

Fintech Update

Edisi Januari - Maret 2026



Satu Dekade AFTECH: Dari Akselerasi ke Orkestrasi Ekosistem Fintech Indonesia


10 Tahun AFTECH:
Mendorong Inovasi,
Menjaga Kepercayaan,
dan Menata Masa
Depan Industri Fintech
Indonesia

Sharper Risk
Separation, Smarter
Approval Growth:
Refleksi atas Evolusi
Skor Kredit di Era
Digital

Literasi Finansial di
Tempat Kerja: Mengapa
Akses Gaji Lebih Awal
Mulai Diminati
Karyawan Indonesia

Daftar Isi

SOROTAN BULANAN



3	Sambutan Ketua Umum AFTECH	Upcoming Event: Indonesia Digital Bank Summit 2026	88
4	Kegiatan Advokasi Kebijakan	Regulatory News: HukumOnline	89
44	Kegiatan Pengurus	Mengenal FULUS: Fintech & UMKM Jalan Terus	94
53	Kegiatan Pengembangan Komunitas		
74	Artikel Spesial HUT: 10 tahun AFTECH Mendorong Inovasi, Menjaga Kepercayaan, dan Menata Masa Depan Industri Fintech Indonesia		
77	Artikel Member BPS Sharper Risk Separation, Smarter Approval Growth: Refleksi atas Evolusi Skor Kredit di Era Digital		
79	Artikel Member Paywatch Literasi Finansial di Tempat Kerja: Mengapa Akses Gaji Lebih Awal Mulai Diminati Karyawan Indonesia		
81	Artikel DF18		
87	Upcoming Event Rapat Umum Anggota AFTECH 2026		

SAMBUTAN KETUA UMUM

Asosiasi Fintech Indonesia

Para pemangku kepentingan yang saya hormati,

Rekan-rekan anggota AFTECH, serta seluruh mitra industri fintech Indonesia,

Memasuki triwulan pertama tahun 2026, kita menyaksikan dinamika industri fintech yang semakin matang, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Satu dekade perjalanan AFTECH telah membawa kita ke fase baru, dari fokus pada pertumbuhan menuju penguatan kualitas, tata kelola, serta kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

Dalam periode ini, AFTECH terus menjalankan perannya sebagai jembatan strategis antara industri dan regulator. Berbagai engagement dengan OJK, Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya menunjukkan komitmen kita untuk memastikan bahwa inovasi keuangan digital tetap berjalan seiring dengan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan.

Isu-isu strategis seperti reformasi sistem pembayaran, penguatan regulasi sektor keuangan digital, serta advokasi kebijakan terkait bea materai, perpajakan, dan skema asuransi kredit menjadi fokus utama AFTECH dalam memastikan ekosistem tetap kondusif bagi pertumbuhan industri.

Di sisi lain, kami juga melihat bahwa tantangan industri semakin kompleks. Risiko keamanan siber, penipuan digital, serta kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, AFTECH terus mendorong berbagai inisiatif edukasi dan literasi, termasuk peluncuran platform seperti Chatpindar dan modul edukasi keuangan bagi generasi muda, sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap industri fintech.

Kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci. Keterlibatan AFTECH dalam berbagai forum nasional dan internasional, termasuk penguatan posisi dalam ekosistem global, menunjukkan bahwa industri fintech Indonesia memiliki peran strategis tidak hanya di tingkat domestik, tetapi juga dalam percaturan global.

Ke depan, kami meyakini bahwa fintech akan semakin berperan sebagai enabler pertumbuhan ekonomi nasional—khususnya dalam mendukung UMKM, memperluas akses pembiayaan, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih merata. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan komitmen bersama dalam menjaga integritas, memperkuat tata kelola, serta memastikan bahwa inovasi yang kita dorong tetap bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota, regulator, dan mitra strategis atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik. Semoga melalui kerja sama yang kuat dan visi yang sejalan, kita dapat terus membangun industri fintech Indonesia yang inovatif, inklusif, dan berdaya saing secara global.

Selamat membaca newsletter triwulan ini.

Salam hormat,

Pandu Sjahrir
Ketua Umum AFTECH



Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Hadiri IBC Business Outlook 2026, Bahas Kepastian, Kapabilitas dan Modal



Percakapan mengenai arah ekonomi Indonesia pada tahun mendatang turut menjadi bagian dari agenda AFTECH melalui kehadirannya dalam forum IBC Business Outlook 2026 bertajuk “Inflection: Breaking the Growth Plateau”. Kegiatan yang diselenggarakan Indonesia Business Council (IBC) ini berlangsung pada 14 Januari 2026.



Forum dibuka oleh William Sabandar selaku COO IBC dan menghadirkan keynote remarks dari Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. Paparan utama disampaikan oleh Denni P. Purbasari, Chief Economist IBC, lalu dilanjutkan dengan diskusi panel bersama Sofyan Djalil, Agus Martowardojo, Vid Adrison, dan Raden Pardede.

Dalam forum tersebut disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di kisaran 4,3-5 persen dinilai belum cukup untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas maupun menopang pertumbuhan jangka panjang. Indonesia disebut berada pada persimpangan strategis antara mempertahankan model pertumbuhan berbasis komoditas dan konsumsi, atau beralih menuju pertumbuhan yang bertumpu pada produktivitas dan nilai tambah.

IBC kemudian merekomendasikan tiga pilar utama transformasi ekonomi, yaitu certainty, capability, dan capital. Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan resilien, dengan target pertumbuhan 2026 sekitar 5,4 persen yang didukung oleh konsumsi domestik, investasi, ekspor, serta transformasi digital dan penguatan inklusi keuangan sebagai motor pertumbuhan baru. Sebagai tindak lanjut, Ketua Umum akan menindaklanjuti pertemuan dengan CEO dan COO IBC dalam rangka pembahasan rencana kerja AFTECH dan IBC yang telah dijadwalkan sejak 2025.

AFTECH Sampaikan Masukan ke DPD RI untuk Perkuat Arah Revisi UU PPSK



Pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) menjadi salah satu agenda AFTECH dalam pertemuan dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang berlangsung pada 19 Januari 2026 di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta. Pertemuan dipimpin oleh Tamsil Linrung selaku Wakil Ketua DPD RI dan turut dihadiri perwakilan Komite II, Komite III, dan Komite IV DPD RI. AFTECH diwakili oleh Chrisma Albandjar selaku Wakil Sekretaris Jenderal I dan Mercy Simorangkir sebagai Direktur Eksekutif.

Dalam forum ini, DPD RI menerima pandangan dan masukan AFTECH, khususnya terkait optimalisasi pemanfaatan fintech untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. AFTECH juga menyoroti pentingnya peran asosiasi yang kompeten dan berintegritas dalam perlindungan konsumen layanan keuangan digital serta pengembangan ekonomi digital nasional. Lantas, AFTECH memandang perlu rancangan regulasi untuk mendorong inovasi keuangan digital secara bertanggung jawab, berbasis risiko, dan tetap membuka ruang kolaborasi antara fintech dengan sektor riil di daerah. Hal ini dinilai penting agar kehadiran fintech tidak hanya memperluas akses layanan keuangan, tetapi juga berkontribusi lebih nyata terhadap penguatan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.

Sebagai tindak lanjut, AFTECH akan menyampaikan masukan tertulis terkait revisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) kepada Ketua DPD RI untuk diteruskan kepada DPR RI. Selain itu, AFTECH dan DPD RI juga akan menjajaki kolaborasi program di daerah, antara lain melalui edukasi literasi keuangan digital seperti Indonesia Fintech Youth Community (Infinity), Fintech dan UMKM Jalan Terus (FULUS), serta pengembangan Digital x Real Sector Launchpad.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Ikuti Diseminasi Bank Indonesia, Dalam Reformasi Pengaturan Industri Sistem Pembayaran



Perubahan arah kebijakan di sektor sistem pembayaran turut menjadi perhatian AFTECH melalui kehadirannya dalam kegiatan “Diseminasi Kebijakan Reformasi Pengaturan Industri Sistem Pembayaran” yang diselenggarakan Bank Indonesia pada 19 Januari 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Perry Warjiyo selaku Gubernur Bank Indonesia, dan AFTECH diwakili oleh Budi Gandasoebrata sebagai Wakil Ketua Umum II.

Forum ini dihadiri oleh pimpinan asosiasi industri keuangan, perbankan nasional dan internasional, serta pelaku sistem pembayaran dan ekosistem digital. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa reformasi pengaturan sistem pembayaran merupakan agenda yang akan berdampak luas terhadap industri dan perlu dipahami secara bersama.

Materi yang disampaikan mencakup arah reformasi struktur industri sistem pembayaran, implementasi cetak biru Sistem Pembayaran Indonesia 2030, penyesuaian klasifikasi dan perizinan Penyelenggara Jasa Pembayaran, serta timeline implementasi Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang akan berlaku efektif mulai 31 Maret 2026. Paparan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan yang akan segera dihadapi pelaku industri.



Menindaklanjuti hal itu, AFTECH akan mengonsolidasikan pemahaman kebijakan ini kepada anggota serta membuka ruang dialog lanjutan dengan regulator guna memastikan kesiapan industri dan kelancaran implementasi.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Hadiri Forum Outlook Perpajakan IKPI 2026



Perkembangan arah kebijakan fiskal dan perpajakan nasional menjadi salah satu isu yang diikuti AFTECH melalui kegiatan “Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI Tahun 2026” yang diselenggarakan pada 20 Januari 2026 di Manhattan Hotel, Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari regulator, pembuat kebijakan, dunia usaha, akademisi, hingga asosiasi industri.

AFTECH diwakili oleh Daniel William selaku Ketua Departemen Tax, Accounting, Finance & Digital Invoicing, bersama tim Policy Sekretariat AFTECH. Sejumlah tokoh eksternal yang hadir sebagai pembicara antara lain Mukhamad Misbakhun, Vaudy Starworld, Fithra Faisal Hastiadi, Ajib Hamdani, Dr. Vid Adrison, dan Pino Siddharta.



Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menegaskan peran strategis IKPI dalam mendukung kebijakan perpajakan nasional melalui edukasi, kolaborasi dan penguatan kepatuhan pajak. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, juga menekankan bahwa perpajakan merupakan pilar utama kemandirian negara serta bagian dari kontrak sosial antara negara dan warga negara, yang harus dijalankan secara adil, proporsional, dan berbasis undang-undang.

Diskusi panel kemudian membahas arah kebijakan fiskal tahun 2026 dari perspektif pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Isu-isu yang mengemuka meliputi tantangan ketahanan fiskal di tengah ketidakpastian global, perlunya perluasan basis pajak secara berkelanjutan, implementasi Core Tax System, serta pentingnya pendekatan kepatuhan pajak yang lebih humanis, khususnya bagi UMKM dan ekonomi digital. Dari perspektif dunia usaha dan akademisi, forum ini juga menyoroti rendahnya tax ratio nasional, besarnya aktivitas ekonomi di wilayah grey economy, serta pentingnya integrasi data lintas sektor termasuk pemanfaatan NIK untuk memperkuat administrasi perpajakan dan mendorong kepatuhan sukarela.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Bahas Penguatan Kerangka PALN bersama OJK



Perkembangan perdagangan dan investasi saham asing melalui mekanisme Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri (PALN) menjadi fokus audiensi AFTECH dengan Deputi Komisioner OJK Pasar Modal dan Lembaga Efek pada 21 Januari 2026 di Gedung OJK Soemitro Djohadikusumo, Jakarta.

Dari pihak OJK hadir Eddy Manindo Harahap, Henry Rialdi, Agustyatun Muji Rahayu Prihatin, Bimahyunaidi Umayah, serta tim dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. Sementara dari AFTECH hadir Chrisma Albandjar, Megawati Soewardi, Norman Wanto, Aditya Hendraatmaja, Jonathan Gregorius M. Tampubolon, Dessy Bonita serta tim Policy Sekretariat AFTECH.

AFTECH juga menyampaikan sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian regulator. Ketidakpastian regulasi dinilai berpotensi mendorong migrasi investor ke aplikasi offshore yang tidak berizin, sehingga meningkatkan risiko perlindungan konsumen. Dari sisi perpajakan, ketiadaan aturan pajak final pasca pencabutan regulasi sebelumnya menyebabkan keuntungan PALN dikenakan pajak progresif hingga 35 persen, yang dinilai menurunkan daya saing pialang domestik dibandingkan platform luar negeri. Industri juga menilai terjadi stagnasi penambahan daftar saham asing, yang menghambat akses investor domestik terhadap global IPOs dan produk baru.

Sebagai rekomendasi, AFTECH mengusulkan agar PALN ditegaskan sebagai mekanisme kebijakan utama dan berkelanjutan dalam mengelola akses investor domestik ke efek asing, dengan penyempurnaan pada aspek tata kelola, pengawasan transaksi, pelaporan, dan perlindungan investor. OJK menanggapi dengan menyampaikan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara penguatan pengawasan dan keberlanjutan ekosistem, sembari menyoroti isu konsentrasi risiko sebagai salah satu aspek yang perlu dikaji lebih lanjut. Ke depan, AFTECH akan mengawal pengembangan regulasi OJK terkait PALN, Brokerage-as-a-Service, serta mekanisme listing dan delisting efek saham asing, sekaligus melakukan advokasi kebijakan perpajakan dan mendukung kegiatan edukasi serta literasi investasi daring.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Hadiri Penyerahan Dana Korban Scam oleh IASC

Jakarta, 21 Januari 2026



Komitmen terhadap perlindungan konsumen kembali terlihat melalui partisipasi AFTECH dalam kegiatan Penyerahan Dana Masyarakat Korban Scam yang diselenggarakan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) pada 21 Januari 2026. Kegiatan ini berlangsung di Gedung A.A. Maramis, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, dan dihadiri AFTECH melalui Budi Gandasoebrota selaku Wakil Ketua Umum II.

AFTECH hadir sebagai perwakilan asosiasi industri fintech nasional dalam kegiatan yang juga dihadiri Ketua Dewan Komisiner OJK, Ketua Komisi XI DPR RI, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, pimpinan Satgas PASTI, direksi perbankan, serta pimpinan berbagai asosiasi sektor keuangan dan teknologi.

Penyerahan dana ini menjadi simbol konkret hasil sinergi lintas regulator, industri, dan asosiasi dalam upaya penyelamatan dana masyarakat korban penipuan keuangan. Selain penyerahan dana, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap risiko penipuan, memperkuat mekanisme perlindungan konsumen, serta mendorong kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus kejahatan keuangan yang semakin kompleks.

Bagi AFTECH, partisipasi dalam kegiatan ini menegaskan komitmen asosiasi dalam mendukung agenda nasional pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Keterlibatan tersebut sekaligus memperkuat posisi AFTECH sebagai mitra strategis regulator dalam membangun ekosistem keuangan digital yang aman, terpercaya, dan berintegritas.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Beri Masukan dalam Penyusunan Blueprint SDM OJK 2026–2030



Penguatan kapasitas pengawasan sektor jasa keuangan menjadi salah satu isu yang diikuti AFTECH melalui partisipasinya dalam Focus Group Discussion Penyusunan Blueprint Pengembangan Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan 2026–2030 yang diselenggarakan secara daring pada 23 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses revisi Blueprint SDM OJK sebelumnya untuk periode 2021–2025, yang disesuaikan dengan dinamika regulasi pasca berlakunya UU P2SK, pesatnya digitalisasi, dan meningkatnya kompleksitas sektor jasa keuangan.

AFTECH hadir sebagai perwakilan asosiasi industri fintech melalui Firlie Ganinduto selaku Sekretaris Jenderal dan Agus Deva Adhikusuma dari Sekretariat AFTECH. Forum ini juga dihadiri oleh perwakilan asosiasi sektor jasa keuangan lain, termasuk AFSI dan AFPI, serta jajaran internal OJK. Kegiatan dibuka oleh Nyoman Puspani yang menegaskan bahwa Blueprint SDM OJK 2026–2030 diharapkan menjadi instrumen strategis untuk menyiapkan pengawas yang tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai enabler industri yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan.

Dalam sesi pemaparan, Tim EY Consulting menjelaskan berbagai tantangan eksternal yang memengaruhi kebutuhan kompetensi SDM OJK ke depan. Tantangan tersebut meliputi meningkatnya ekspektasi konsumen terhadap layanan keuangan digital, kompleksitas model bisnis, pemanfaatan AI dan otomatisasi, embedded finance, open finance, serta tuntutan pengawasan lintas sektor. Sejalan dengan itu, pengembangan kompetensi SDM OJK diarahkan pada penguatan literasi digital, data analytics, pemanfaatan SupTech, keamanan siber, serta pengambilan keputusan berbasis data.

Dalam sesi diskusi, AFTECH menekankan pentingnya pendekatan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) dan pemahaman kontekstual terhadap model bisnis fintech yang dinamis. AFTECH menyoroti bahwa pengawasan yang diseragamkan tanpa mempertimbangkan karakteristik dan risiko inheren model bisnis berpotensi tidak proporsional dan kurang efektif. AFTECH juga menegaskan perlunya penguatan supervisory judgment, kemampuan analitis, serta pendekatan pengawasan yang konstruktif agar tidak menghambat inovasi, namun tetap menjaga perlindungan konsumen dan integritas industri.

Partisipasi AFTECH dalam forum ini mencerminkan peran aktif asosiasi dalam mendukung OJK menyusun kerangka pengembangan SDM pengawas yang adaptif, forward-looking, dan selaras dengan visi pengembangan ekosistem keuangan digital Indonesia. Ke depan, AFTECH menyatakan siap mendukung proses finalisasi Blueprint SDM OJK 2026–2030 melalui penyampaian masukan lanjutan bila diperlukan, sekaligus mendorong penguatan kolaborasi berkelanjutan antara OJK dan asosiasi dalam pengembangan kompetensi pengawasan fintech.



Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Bahas Strategi Advokasi atas Penerapan Bea Meterai pada Transaksi Digital



Pembahasan mengenai penerapan Bea Meterai pada transaksi digital menjadi fokus rapat koordinasi yang diselenggarakan dua departemen AFTECH, yakni Departemen LPBBTI dan Departemen BNPL, pada 26 Januari 2026. Rapat yang berlangsung secara daring ini menjadi bagian dari persiapan AFTECH sebelum audiensi dengan OJK sekaligus dalam rangka merumuskan posisi kebijakan kepada pemerintah. Wakil Ketua Umum III, Ketua Departemen LPBBTI, Ketua Departemen BNPL, perwakilan anggota AFTECH dari kedua model bisnis fintech, serta Sekretariat AFTECH turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam rapat ini, AFTECH menyepakati bahwa strategi advokasi akan diarahkan bukan sebagai bentuk penolakan regulasi, melainkan sebagai rekomendasi untuk mendukung penyesuaian kebijakan Bea Meterai agar lebih selaras dengan karakteristik transaksi keuangan digital, khususnya model bisnis berbasis transaksi mikro berfrekuensi tinggi sebagaimana diatur dalam PMK 78/2024. Penajaman narasi ini dipandang penting agar posisi asosiasi tetap konstruktif dan berbasis solusi.

Pembahasan juga menyoroti dampak kebijakan apabila kewajiban bea meterai diterapkan pada setiap transaksi digital. Penerapan tersebut dinilai dapat menimbulkan tekanan kenaikan beban operasional yang signifikan bagi penyelenggara fintech dan digital, terlebih bila diterapkan secara retroaktif. Di sisi lain, konsumen layanan fintech, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, berpotensi ikut menanggung beban biaya tambahan, yang pada akhirnya dapat menghambat optimalisasi fintech dalam mendorong inklusi keuangan.

Selain itu, rapat mencermati adanya ketidakselarasan antara pengaturan bea meterai dengan model perjanjian digital seperti click wrap agreement dan master agreement, yang tidak selalu menghasilkan dokumen individual per transaksi. Advokasi AFTECH atas isu ini akan difokuskan pada analisis dampak dan didukung oleh kajian empiris. Sebagai tindak lanjut, AFTECH akan mengirimkan surat tanggapan resmi kepada OJK, menyiapkan TOR kajian empiris, serta setelah kajian siap akan mengajukan audiensi dengan OJK dan DJP, termasuk mengusulkan FGD bersama OJK, DJP, dan industri dalam satu forum.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Bahas Rencana Skema Asuransi Kredit bagi LPBBTI



Rencana penerapan skema asuransi kredit bagi penyelenggara LPBBTI menjadi pokok bahasan dalam diskusi antar departemen AFTECH yang digelar pada 27 Januari 2026. Rapat ini mempertemukan Departemen LPBBTI, Departemen Insurtech, serta perwakilan digital bank anggota AFTECH untuk membahas rencana OJK yang akan mewajibkan penerapan skema asuransi kredit, khususnya pada kerja sama bank channeling. Wakil Ketua Umum V, Ketua Departemen LPBBTI, perwakilan bank digital, anggota AFTECH dari model bisnis LPBBTI, dan Sekretariat AFTECH hadir dalam diskusi tersebut.

Pertemuan ini menyepakati bahwa terdapat isu ketidaksinkronan regulasi asuransi kredit pada industri LPBBTI, yang dipandang sebagai tantangan krusial dalam memperkuat ekosistem jasa keuangan. Diskusi menyoroti perlunya kebijakan yang lebih spesifik dan tidak disamaratakan antara perbankan dan LPBBTI. Sejumlah isu utama yang mengemuka mencakup ketidakjelasan risiko, heterogenitas profil risiko penyelenggara LPBBTI, perlindungan lender dan penagihan, pembatasan penggunaan skema Administrative Services Only (ASO), serta kebutuhan sinkronisasi regulasi di sektor perbankan, LPBBTI, dan asuransi.

Dari sisi risk profile dan pricing, penerapan premi flat sebesar 1,5 persen per bulan dinilai memberatkan bagi penyelenggara LPBBTI yang memiliki profil risiko beragam. Skema tersebut juga dipandang tidak mencerminkan praktik umum asuransi kredit di sektor perbankan yang berbasis risk-based pricing dan claim ratio. Selain itu, industri menilai masih diperlukan kejelasan mengenai struktur premi dan klaim, termasuk dasar penghitungan premi dan kesesuaian antara eksposur risiko dengan biaya yang harus ditanggung penyelenggara LPBBTI.

Diskusi juga menyoroti potensi dampak kebijakan terhadap industri, mulai dari peningkatan biaya layanan, penurunan minat perbankan untuk menyalurkan dana melalui platform LPBBTI, hingga kekhawatiran terhadap persaingan usaha yang sehat akibat keterbatasan konsorsium asuransi yang tersedia. Dari perspektif konsumen, tambahan biaya premi tanpa mekanisme consent dan transparansi informasi yang memadai dikhawatirkan memperkuat persepsi negatif terhadap industri LPBBTI. Karena itu, peserta rapat menyepakati perlunya dialog komprehensif lintas sektor sebelum kebijakan diwajibkan. Sebagai langkah lanjut, AFTECH akan mengajukan audiensi kepada OJK, menyampaikan permohonan FGD lintas sektor, serta merangkum hasil diskusi sebagai bahan posisi industri.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Cermati Arah Industri melalui Indonesia Crypto Outlook 2026



Perkembangan industri aset keuangan digital menjadi salah satu perhatian AFTECH melalui kehadirannya dalam Indonesia Crypto Outlook 2026 yang diselenggarakan Tokocrypto pada 29 Januari 2026 di Jakarta Selatan. Forum bertema Mission Control: Steering Indonesia's Crypto Industry into the Next Chapter ini dihadiri pelaku industri, asosiasi, pemangku kebijakan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem aset digital. Kehadiran AFTECH dalam kegiatan ini diwakili oleh Sekretariat.

Forum ini menegaskan posisi Generasi Z, khususnya kelompok usia 18–34 tahun, sebagai tulang punggung investor aset digital di Indonesia. Dalam pembahasan yang mengemuka, kripto disebut tidak lagi dipandang sebagai instrumen alternatif semata, melainkan telah menjadi bagian dari pengambilan keputusan finansial harian generasi muda. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran struktural dalam lanskap keuangan digital nasional.

Dari sisi kinerja industri, salah satu pelaku utama mencatat nilai transaksi kumulatif melampaui Rp160 triliun hingga akhir 2025, dengan pertumbuhan pengguna aktif tahunan mencapai 75 persen atau sekitar 4,8 juta pengguna. Selain itu, forum ini juga menyoroti pentingnya literasi publik yang tercermin dari pelaksanaan lebih dari 168 program edukasi di 50 kota, seiring meningkatnya percakapan publik terkait Web3 dan blockchain.

Ke depan, industri aset digital diproyeksikan bergerak menuju layanan yang lebih kompleks dan terintegrasi, termasuk staking, analisis berbasis kecerdasan buatan, dan instrumen derivatif kripto yang patuh regulasi. Bagi AFTECH, forum ini menjadi referensi strategis untuk memahami arah industri kripto dan blockchain, sekaligus memperkuat peran asosiasi sebagai mitra dialog kebijakan yang mendorong inovasi, tata kelola, dan perlindungan konsumen.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Hadiri Diskusi KOMDIGI tentang Pelindungan Anak di Ruang Digital



Isu pelindungan anak di ruang digital menjadi fokus dalam Forum Group Discussion bertajuk Upaya Bersama, Wujudkan Masa Depan yang Ramah Anak yang diselenggarakan KOMDIGI pada 3 Februari 2026 di Jakarta. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang dialog antara pemerintah, industri, asosiasi, dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. AFTECH hadir melalui perwakilan Sekretariat.

Forum ini menghadirkan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Ketua Umum idEA Hilmi Adrianto, perwakilan KPAI, Save the Children, serta pelaku industri dan asosiasi. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan memperlihatkan bahwa isu pelindungan anak di ruang digital memerlukan pendekatan yang lintas sektor dan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.



Dalam paparannya, Wakil Menteri menyoroti maraknya pemalsuan usia pengguna pada platform digital, yang meningkatkan risiko paparan anak terhadap konten dewasa dan ekstrem. Pemerintah karena itu mendorong penggunaan teknologi deteksi usia berbasis perilaku atau age inferential, sebagai pergeseran dari verifikasi usia berbasis data diri menuju pendekatan yang bertumpu pada analisis pola perilaku pengguna. Dari sisi industri, idEA menyatakan dukungan terhadap kebijakan pelindungan anak, sambil menekankan perlunya aturan turunan yang implementatif dan fleksibel agar tidak membatasi akses anak terhadap konten positif. Industri juga menyoroti pentingnya pendekatan safety by design agar unsur keamanan terintegrasi sejak tahap perancangan platform.

Diskusi mengangkat sejumlah isu utama, mulai dari tantangan pemalsuan usia, kesiapan teknologi dan biaya implementasi regulasi, keseimbangan antara keamanan dan inovasi, hingga peran keluarga dalam pendampingan anak. Forum ini juga menegaskan perlunya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, industri, dan masyarakat, serta kebutuhan akan aturan turunan yang lebih rinci dan operasional. Selain itu, peran orang tua dan masyarakat dipandang penting dalam mendukung efektivitas kebijakan melalui peningkatan literasi dan kesadaran publik, disertai kebutuhan akan forum lanjutan dan mekanisme pemantauan implementasi agar pengaturan berjalan efektif dan proporsional.

AFTECH Beri Masukan dalam FGD Bappenas tentang Ekosistem dan Keamanan Digital



Pengembangan ekosistem dan keamanan digital nasional menjadi pokok bahasan dalam FGD yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas pada 3 Februari 2026 sebagai bagian dari penjangkaran masukan awal penyusunan White Paper Roadmap Infrastruktur Digital 2025. Dalam forum ini, AFTECH diwakili oleh Wakil Ketua Umum I, didampingi Tim Sekretariat, bersama perwakilan Bappenas dan Ketua Umum ADIGSI.

FGD ini menjadi tahap awal pengumpulan gagasan lintas pemangku kepentingan yang nantinya akan dirumuskan dalam white paper dan dilanjutkan dengan pelibatan kementerian serta lembaga teknis terkait. Dalam kesempatan tersebut, AFTECH memaparkan peran asosiasi dalam ekosistem keuangan digital sekaligus komitmen dalam penerapan tata kelola dan pengawasan etik anggota sebagai bagian dari penguatan fondasi industri.

Salah satu isu yang ditekankan AFTECH adalah pentingnya penguatan Digital Public Infrastructure, terutama identitas digital nasional yang terintegrasi. Infrastruktur ini dipandang krusial untuk menekan biaya dan kompleksitas onboarding pada layanan keuangan digital, sekaligus memperkuat kepercayaan antarpelaku. Diskusi juga menyoroti kebutuhan interoperabilitas dan pertukaran data lintas industri untuk mendukung pencegahan penipuan secara kolektif. Dari sisi keamanan siber, Ketua Umum ADIGSI menyampaikan pentingnya kesiapan ekosistem keamanan siber nasional, termasuk kolaborasi dengan BSSN, untuk menopang perlindungan sistem dalam lanskap digital yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, forum ini menegaskan bahwa penguatan ekosistem dan keamanan digital nasional memerlukan pendekatan yang menyeluruh, bukan hanya melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga lewat penguatan layanan digital, tata kelola, dan kolaborasi lintas sektor. Sebagai tindak lanjut, AFTECH akan mendokumentasikan seluruh masukan FGD sebagai kontribusi strategis dalam penyusunan White Paper Roadmap Infrastruktur Digital 2025, memantau proses lanjutan di Bappenas, dan menjaga koordinasi berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan terkait.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Hadiri Roundtable Indonesia Economic Summit 2026 Bahas Pembiayaan Ekonomi Islam



Peran Islamic finance dalam memperdalam pasar keuangan nasional menjadi tema yang dibahas dalam Thematic Roundtable Session rangkaian Indonesia Economic Summit 2026 yang diselenggarakan Indonesian Business Council bersama Global Ethical Finance Initiative pada 4 Februari 2026. AFTECH hadir sebagai partisipan aktif melalui Sekretaris Jenderal beserta tim Sekretariat, bersama perwakilan regulator, pelaku industri, akademisi, investor, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.



Forum ini menekankan bahwa tantangan sistem keuangan Indonesia bukan sekadar pertumbuhan, tetapi juga pendalaman pasar, penguatan likuiditas, dan mobilisasi pembiayaan jangka panjang. Dalam konteks tersebut, keuangan syariah diposisikan sebagai bagian strategis dari infrastruktur keuangan nasional yang dapat menopang pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Diskusi menyoroti kebutuhan akan instrumen syariah berkelanjutan yang terstandar, likuid, dan kredibel secara global, termasuk penguatan sukuk berkelanjutan dan pembiayaan adaptasi iklim. Bank Indonesia menegaskan pentingnya pengembangan pasar uang syariah dan optimalisasi SBSN sebagai underlying operasi moneter. Sementara itu, OJK menyampaikan pentingnya penguatan kerangka keuangan berkelanjutan melalui taksonomi yang tepat, sustainability-linked securities, serta integrasi keuangan komersial dan sosial syariah.

Dalam forum ini, AFTECH menekankan peran fintech syariah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan proyek komunitas, sekaligus pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara bank dan fintech untuk mendorong pembiayaan berbasis dampak yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, AFTECH akan melanjutkan pengenalan dan komunikasi dengan GEFI sebagai bagian dari pembukaan ruang kolaborasi lebih lanjut.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Cermati Arah Kebijakan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan



Arah kebijakan strategis sektor jasa keuangan dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional menjadi fokus Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan yang diselenggarakan OJK pada 5 Februari 2026 di Jakarta. Forum ini mengusung tema penguatan stabilitas dan kontribusi sektor jasa keuangan bagi pendalaman pasar dan perekonomian nasional, serta menjadi ruang penyampaian kebijakan strategis OJK dan pemerintah di tengah dinamika global.

Dalam forum tersebut, Friderica Widyasari Dewi selaku Penjabat Sementara Ketua Dewan Komisiner OJK menegaskan bahwa 2026 merupakan fase krusial bagi penguatan ketahanan sektor keuangan. OJK disebut tengah menjalankan delapan Rencana Aksi Reformasi Integritas Pasar Modal, termasuk peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen dan kewajiban



pengungkapan ultimate beneficial owner di atas 1 persen guna mencegah manipulasi pasar. OJK juga menyoroti penguatan perlindungan konsumen melalui Indonesia Anti-Scam Center yang telah memulihkan dana masyarakat sebesar Rp161 miliar.

Dari sisi industri, OJK memproyeksikan aset dana pensiun tumbuh 10–12 persen pada 2026 hingga mencapai sekitar Rp1.880 triliun. Pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11 persen, dengan akselerasi 5,39 persen pada kuartal IV, dinilai memberi fondasi makro yang solid. Pada saat yang sama, OJK meluncurkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia Versi 3 guna memperkuat kerangka pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi energi, termasuk optimalisasi pendanaan Just Energy Transition Partnership.

Pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan bahwa stabilitas makro Indonesia tetap kuat, tercermin dari inflasi yang terkendali, cadangan devisa yang memadai, dan rasio utang terhadap PDB yang berada di bawah 40 persen. Pemerintah turut menyoroti peran Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai instrumen percepatan investasi melalui skema co-investment, serta langkah-langkah stimulus untuk mendorong konsumsi domestik dan pembiayaan program prioritas. Forum ini memberikan gambaran yang luas mengenai arah kebijakan sektor jasa keuangan nasional dalam menopang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi ke depan.



Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Dukung Penguatan Kampanye Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

HIGH LEVEL DESIGN PIDI

Desain PIDI memastikan inovasi tidak berhenti pada ide, tetapi bergerak secara end-to-end melalui Market Intelligence, Innovation Experimentation dan Digital Talent Development...

	MARKET INTELLIGENCE	INNOVATION EXPERIMENTATION	DIGITAL TALENT DEVELOPMENT
DEFINISI	PEMETAAN KEBUTUHAN & PERKEMBANGAN INOVASI	EKSPLORASI INOVASI DGN PENGEMBANGAN IDE BARU	WADAH SERTIFIKASI & PELATIHAN TALENTA INNOVATOR DIGITAL
TUJUAN	Pemetaan tren & pelaku inovasi teknologi, Asesmen manfaat dan risiko inovasi, Pemetaan potensi & fasilitasi DDSE	Memecahkan problem statement, Pengembangan innovation frontier, Mengembangkan knowledge & skillset baru	Menciptakan lapangan kerja digital, Mencetak talenta digital berbakat
AKTIVITAS	Market watch, IDENTIFICATION, INDUSTRY ANALYSIS	Innovation Frontier, RESEARCH, SANDBOXING, COORDINATION, MENTORING	Pengembangan Inovator, PEMBELAJARAN, SERTIFIKASI, GRADUATION, JOB FAIR
OUTCOME / GOALS	Policy Recommendation, Input utk Pengawasan, Fast Track PoC & Sandbox	Acceptable Innovation, Internasionalisasi, Peningkatan kapasitas regulator & industri, Start-up & Business Matching	Qualified Digital Talent Pool, Talent & Job Matching, Akreditasi Modul Standar Nasional
INISIATIF	SIGMA	HACKATHON	DIGDAYA
FOKUS PESERTA	PSP, Perusahaan Teknologi	Akademisi, K/L & Pemda	Organisasi Internasional, Masyarakat

KOLABORASI

Evaluasi pelaksanaan program Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen dan arah kampanye tahun 2026 menjadi pokok bahasan dalam rapat yang diselenggarakan Bank Indonesia melalui Departemen Stabilitas Sistem Keuangan dan Perlindungan Konsumen pada 6 Februari 2026 di Jakarta. Pertemuan ini mempertemukan AFTECH, ASPI, dan PERBANAS untuk membahas evaluasi GEBER PK tahun 2025 sekaligus merancang strategi kampanye tahun 2026. Dari AFTECH, rapat dihadiri oleh Marcomm Director.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Grup Perlindungan Konsumen DSPK Bank Indonesia, Diana Yumanita, bersama jajaran memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan program 2025. Bank Indonesia menyampaikan bahwa kampanye GEBER PK berhasil mencatat 180 juta views, yang sebagian besar ditopang oleh strategi penyebaran konten secara top-down. Meskipun capaian awareness dinilai signifikan, Bank Indonesia menekankan perlunya peningkatan strategi komunikasi dan activation agar keterlibatan masyarakat dapat tumbuh lebih mendalam, tidak berhenti pada peningkatan kesadaran semata.

Untuk tahun 2026, Bank Indonesia mengusulkan penguatan kampanye dengan tema #KalauRaguStopDulu, yang menekankan prinsip kehati-hatian masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, terutama yang berbasis digital. Kampanye ini dirancang untuk menjangkau tidak hanya sektor perbankan, tetapi juga ekosistem fintech yang lebih luas, dengan sasaran utama Generasi Z dan perempuan dewasa.

Dalam diskusi, asosiasi industri menyampaikan berbagai masukan mengenai bentuk kontribusi dan aktivasi kampanye. AFTECH menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan GEBER PK 2026 melalui program kerja tahunan seperti INFINITY yang secara konsisten diselenggarakan bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia di berbagai daerah, berbagai kegiatan kehumasan termasuk media visit dan editor in chief gathering, serta kolaborasi dengan mitra dalam ekosistem ekonomi dan layanan keuangan digital. Dukungan ini menunjukkan komitmen AFTECH untuk terus terlibat dalam penguatan perlindungan konsumen melalui pendekatan edukasi yang lebih luas dan terintegrasi.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Sampaikan Posisi PSrE dan PJAP kepada Dirjen Pajak



AFTECH melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI pada 11 Februari 2026 di Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkenalkan lebih jauh kontribusi AFTECH, khususnya dari sisi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan, dalam mendukung pengembangan ekosistem perpajakan digital nasional.

Salah satu poin penting yang disampaikan adalah bahwa PSrE telah menjadi salah satu opsi tanda tangan digital tersertifikasi dalam aplikasi Coretax DJP. Dalam penjelasannya, AFTECH membedakan dengan jelas antara penggunaan kode otorisasi dan tanda tangan digital tersertifikasi, terutama dari sisi integritas dokumen dan kekuatan autentikasi. Penjelasan ini penting untuk menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam administrasi pajak tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga soal keamanan dan kepastian proses.

AFTECH juga menyoroti peran PJAP sebagai bagian yang membantu menopang layanan perpajakan digital. Selama ini, PJAP dipandang berkontribusi dalam mengurangi beban sistem, mendukung kelancaran layanan kepada wajib pajak, serta membantu menjaga tingkat kepatuhan di tengah proses transformasi yang masih berjalan. Dari sisi industri, posisi PJAP dinilai tetap relevan justru karena sistem inti belum sepenuhnya lepas dari tantangan operasional.

Dalam diskusi, muncul pandangan bahwa jika Coretax berjalan sangat optimal, maka kebutuhan terhadap PJAP dapat dipersepsikan menurun. Bagi AFTECH dan pelaku industri, ini menjadi isu yang perlu dijawab secara serius. Sebab, keberadaan PJAP selama ini bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari ekosistem yang membantu fungsi layanan dan kepatuhan berjalan lebih efektif.

Karena itu, audiensi ini menjadi titik awal untuk mendorong penyusunan dokumen advokasi yang lebih komprehensif mengenai nilai tambah PJAP dan kontribusinya terhadap perpajakan digital. Bagi AFTECH, pekerjaan berikutnya adalah memastikan bahwa peran industri ini dipahami secara tepat dalam arsitektur transformasi pajak yang sedang dibangun.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Hadiri *Roundtable* Industri Perdagangan Berjangka



AFTECH menghadiri Dupoin Futures Regulatory & Industry Roundtable 2026 pada 12 Februari 2026 di Jakarta. Forum ini mempertemukan regulator, pelaku industri perdagangan berjangka, asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas arah pengembangan industri yang semakin dipengaruhi oleh teknologi dan kebutuhan efisiensi.

Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa industri perdagangan berjangka juga sedang mempercepat transformasi digitalnya. Beberapa fokus yang disebut antara lain pemanfaatan AI-driven insights, pembangunan next-gen trading ecosystem, penguatan kepatuhan lewat automated KYC, dan pengembangan sistem perlindungan digital. Arah ini menunjukkan bahwa banyak isu yang dihadapi perdagangan berjangka semakin dekat dengan isu yang lebih dulu berkembang di ekosistem fintech.

Dari sisi regulator dan pelaku industri, ada penekanan bahwa transformasi teknologi perlu tetap dibarengi tata kelola yang kuat. Ini penting karena digitalisasi di sektor keuangan tidak hanya membuka peluang efisiensi, tetapi juga membawa tantangan baru dari sisi pengawasan, perlindungan pengguna, dan stabilitas pasar. Dalam hal ini, pengalaman antar-sektor dapat menjadi sumber pembelajaran yang berguna.

Bagi AFTECH, forum ini memberi kesempatan untuk melihat irisan yang makin jelas antara fintech dan perdagangan berjangka, khususnya pada aspek teknologi, kepatuhan, dan edukasi pasar. Minat PT Dupoin Futures Indonesia untuk bergabung sebagai anggota AFTECH juga menjadi sinyal bahwa ruang asosiasi bisa semakin luas dan mencakup lebih banyak pelaku yang bergerak di wilayah transformasi digital jasa keuangan.

Keikutsertaan AFTECH dalam forum ini juga menunjukkan bahwa asosiasi perlu terus membuka diri terhadap sektor-sektor yang memiliki irisan strategis. Pendekatan seperti ini penting agar AFTECH tetap relevan dalam lanskap industri yang semakin terhubung dan tidak lagi bergerak dalam batas-batas sektor yang kaku.

AFTECH Beri Masukan atas Pemetaan KBLI 2025



AFTECH ikut dalam diskusi pemetaan KBLI 2025 untuk subsektor aplikasi yang digelar secara daring pada 13 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses validasi yang dilakukan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif untuk memastikan bahwa klasifikasi usaha yang baru lebih sesuai dengan perkembangan industri digital.

Dalam pembahasannya, dijelaskan bahwa KBLI 2025 tidak hanya berfungsi sebagai kode administrasi, tetapi juga menjadi dasar untuk banyak hal lain, seperti pendataan tenaga kerja, penyusunan insentif, fasilitasi pembiayaan, pengukuran kontribusi ekonomi, hingga proses perizinan. Karena itu, perubahan dalam klasifikasi usaha dapat membawa dampak yang lebih besar daripada yang terlihat di permukaan.

Bagi AFTECH, isu ini menjadi penting karena perkembangan model bisnis digital saat ini jauh lebih cepat dan lebih kompleks dibanding struktur klasifikasi usaha konvensional. Banyak model bisnis tidak lagi mudah dimasukkan ke dalam satu kategori yang sederhana, terutama untuk layanan berbasis API, B2B, intermediasi digital, fintech, dan layanan teknologi yang bekerja di belakang layar tetapi sangat menentukan operasional.

Dalam diskusi, AFTECH menyampaikan bahwa masih ada sejumlah model bisnis yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, termasuk enterprise architecture, process intelligence, dan cybersecurity. Masukan ini penting agar klasifikasi yang baru tidak justru tertinggal dari realitas industri, atau menciptakan ketidaksesuaian yang bisa berdampak pada perizinan dan pendataan usaha.

Bagi AFTECH, keterlibatan dalam forum seperti ini merupakan bagian dari peran asosiasi dalam memastikan bahwa perkembangan industri digital diterjemahkan secara tepat dalam kerangka kebijakan. Meskipun terlihat teknis, isu seperti KBLI dapat berpengaruh langsung terhadap bagaimana pelaku usaha diklasifikasikan, diatur, dan difasilitasi ke depan.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Buka Pembahasan soal Sengketa Jasa Keuangan bersama LAPS SJK



Isu penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan menjadi salah satu pembahasan penting saat AFTECH menerima audiensi dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) pada 18 Februari 2026 di Kantor AFTECH, Jakarta. Pertemuan ini tidak hanya membahas kewajiban keanggotaan LAPS bagi pelaku usaha jasa keuangan, tetapi juga memperlihatkan bahwa mekanisme sengketa kini semakin perlu dipahami sebagai bagian dari tata kelola industri, bukan sekadar urusan setelah masalah muncul.

Dalam pemaparannya, LAPS SJK menjelaskan mandat kelembagaannya serta posisi mereka dalam ekosistem perlindungan konsumen jasa keuangan. Penjelasan ini penting karena banyak pelaku industri masih melihat penyelesaian sengketa sebatas tahapan administratif, padahal dalam praktiknya mekanisme ini berkaitan langsung dengan kejelasan prosedur internal perusahaan, kualitas perjanjian dengan konsumen, dan kesiapan penanganan sengketa sebelum masuk ke forum yang lebih formal.

Diskusi menjadi semakin relevan ketika AFTECH menyoroti pentingnya kualitas penyusunan klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak. Klausul yang tidak jelas dapat menimbulkan kebingungan soal forum penyelesaian, memperpanjang proses, dan pada akhirnya meningkatkan risiko hukum. Untuk industri fintech yang bergerak cepat dan sangat bergantung pada kontrak digital, isu ini bukan detail kecil, melainkan bagian dari fondasi tata kelola.

LAPS SJK juga menyampaikan bahwa mereka terbuka untuk menjalin kolaborasi dengan AFTECH dalam bentuk capacity building, webinar, dan forum edukasi lainnya. Bagi AFTECH, tawaran ini membuka ruang yang cukup konkret untuk memperkuat pemahaman anggota terhadap mediasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Di titik ini, pembahasan tidak lagi berhenti pada kepatuhan formal, tetapi mulai mengarah pada peningkatan kapasitas industri secara praktis.

Dari pertemuan ini terlihat bahwa penguatan ekosistem tidak hanya bergantung pada inovasi dan pertumbuhan, tetapi juga pada kesiapan industri menghadapi sengketa dengan mekanisme yang tertib, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, ruang kolaborasi AFTECH dengan LAPS SJK menjadi relevan untuk dilihat sebagai bagian dari penguatan tata kelola sektor fintech ke depan.

AFTECH Mulai Susun White Paper Advokasi Bea Materai dan PPN atas Transaksi Digital



AFTECH memulai proses penyusunan white paper advokasi bea materai dan PPN atas transaksi digital melalui kick off meeting bersama Prasasti Center pada 18 Februari 2026. Langkah ini menunjukkan bahwa isu perpajakan transaksi digital tidak lagi bisa dibahas secara sektoral atau reaktif, melainkan perlu didorong melalui kajian yang lebih sistematis agar posisi industri dapat disampaikan dengan argumentasi yang kuat dan berbasis data.

Dalam pertemuan tersebut, AFTECH dan Prasasti Center menyepakati kerangka kerja kajian yang akan mencakup analisis regulasi bea materai di Indonesia, pemetaan kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik bisnis digital, serta pendalaman sektoral pada BNPL, P2P Lending, dan Insurtech. Kajian ini juga akan dibekali benchmarking dari beberapa yurisdiksi lain agar pembahasan tidak berhenti pada keberatan industri, tetapi juga mampu menunjukkan alternatif pendekatan kebijakan yang lebih sesuai dengan karakter transaksi digital.

Yang menjadi perhatian utama AFTECH adalah kenyataan bahwa transaksi digital memiliki karakter yang sangat berbeda dari transaksi konvensional. Banyak layanan fintech, terutama yang terkait pembiayaan mikro, berjalan dalam frekuensi tinggi dan nilai transaksi kecil. Dalam konteks seperti ini, pengenaan bea materai atau perlakuan pajak yang tidak mempertimbangkan karakter transaksi bisa menimbulkan beban administrasi yang besar, mengganggu alur sistem, dan pada akhirnya menambah biaya bagi konsumen.

Pembahasan juga menyoroti potensi dampak kebijakan bila diterapkan secara tidak proporsional. Penerapan bea materai secara retroaktif dinilai berisiko menciptakan beban yang tidak rasional. Di sisi lain, penerapan otomatis ke seluruh transaksi digital juga bisa menimbulkan gangguan pada workflow teknologi, duplikasi perlindungan hukum karena transaksi sudah menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan distorsi pada model bisnis tertentu seperti embedded insurance atau pembiayaan digital bernilai kecil.

Lewat proses penyusunan white paper ini, AFTECH sedang mengambil jalur advokasi yang lebih substantif. Bukan sekadar menolak atau mengkritik, tetapi membangun posisi industri melalui data, kajian sektoral, dan perbandingan kebijakan internasional. Pendekatan ini penting agar ruang dialog dengan otoritas berjalan lebih konstruktif dan memberi peluang bagi lahirnya kebijakan yang lebih proporsional bagi ekosistem digital.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH dan OJK Bahas Arah Pengawasan Baru bagi *Insurtech*



Arah pengawasan terhadap insurtech menjadi salah satu topik penting saat AFTECH melakukan audiensi dengan Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK pada 19 Februari 2026 di Jakarta. Pertemuan ini menunjukkan bahwa diskusi antara asosiasi dan regulator kini mulai bergerak dari sekadar membahas status model bisnis menuju pembahasan yang lebih mendasar tentang kualitas proses, tata kelola, dan kesiapan sistem.

Salah satu sinyal penting yang muncul dari pertemuan ini adalah pandangan OJK bahwa pemisahan antara asuransi digital dan konvensional semakin berkurang relevansinya. Digitalisasi tidak lagi dilihat sebagai kategori usaha yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari fondasi layanan asuransi modern. Ini memberi pesan bahwa penilaian regulator ke depan akan semakin menekankan kualitas operasional dan ketahanan sistem, bukan hanya label atau posisi model bisnis di atas kertas.

Meski demikian, regulator juga menegaskan bahwa digitalisasi tidak bisa berhenti pada klaim penggunaan teknologi. Dalam pembahasan soal LAD dan LPAD, OJK menyoroti masih adanya layanan yang belum benar-benar berjalan end-to-end. Di sisi regulator, hal ini dipandang sebagai titik risiko yang perlu dicermati, terutama dari perspektif operasional dan perlindungan konsumen. Artinya, transformasi digital di sektor asuransi tidak cukup diukur dari kanal distribusinya, tetapi dari sejauh mana sistem, proses, dan kontrolnya benar-benar siap.

(Bersambung ke halaman berikutnya)

Selain model distribusi, isu biaya produk mikro dan bea meterai juga ikut mencuat. Dalam banyak kasus, nilai premi produk digital justru lebih kecil daripada nominal bea materai, sehingga struktur biaya produk menjadi tidak masuk akal. Regulator mencatat isu ini sebagai hal yang perlu dikaji secara proporsional. Pada saat yang sama, AFTECH juga menyampaikan penguatan kode etik terintegrasi dan rencana penyusunan roadmap insurtech jangka menengah. Respons OJK yang terbuka terhadap inisiatif ini menunjukkan bahwa peran asosiasi dalam membentuk standar industri tetap dibutuhkan sebagai pelengkap regulasi formal.

Topik embedded insurance juga menjadi perhatian besar dalam pertemuan ini. OJK menekankan pentingnya integrasi sistem secara real-time dan kesiapan API agar layanan serta proses klaim dapat berjalan efektif. Dari sudut pandang industri, hal ini sangat relevan karena distribusi asuransi kini semakin banyak terjadi melalui e-commerce, ride-hailing, dan platform digital lainnya. Tantangannya, kesiapan teknologi mitra distribusi masih tidak seragam, sehingga kebutuhan akan standar teknis dan tata kelola yang lebih jelas semakin terasa.



Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Cermati RPOJK tentang Perilaku Penyampaian Informasi Sektor Jasa Keuangan



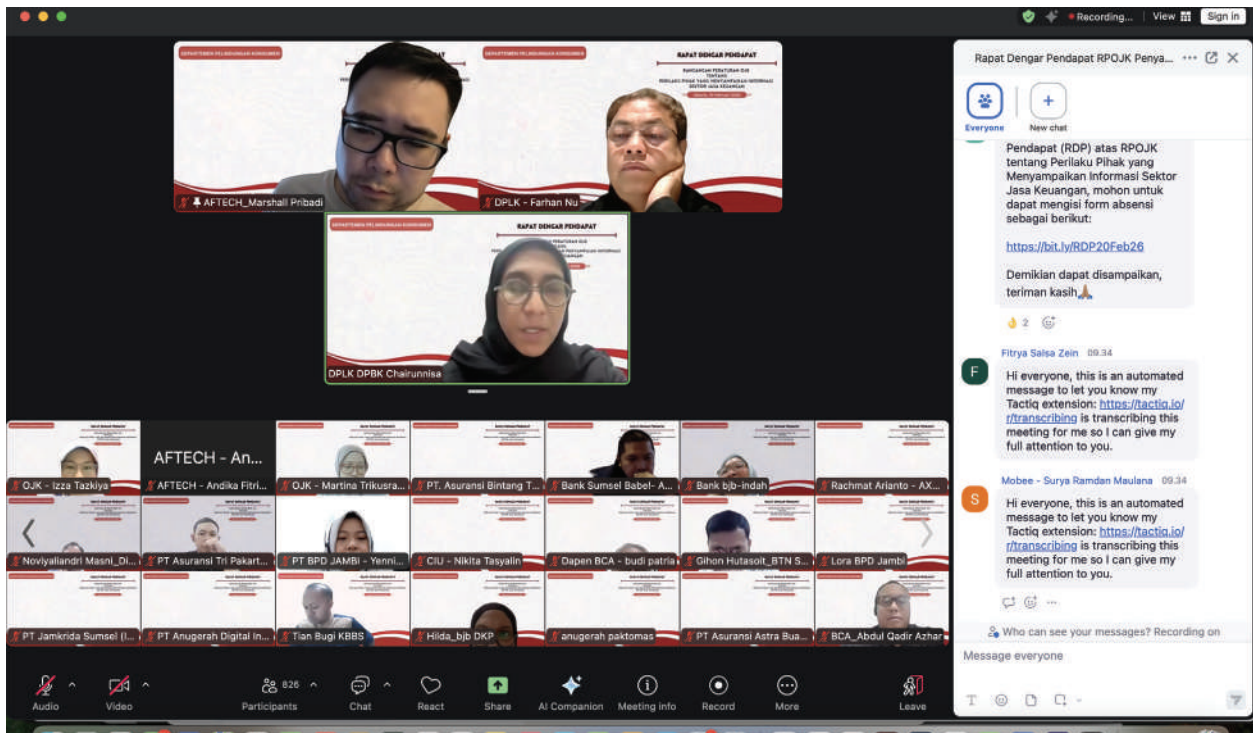
AFTECH menghadiri rapat dengar pendapat yang diselenggarakan OJK pada 20 Februari 2026 dalam rangka konsultasi publik atas Rancangan POJK tentang Perilaku Pihak yang Menyampaikan Informasi Sektor Jasa Keuangan. Rancangan ini menjadi penting karena menyentuh salah satu area yang semakin menentukan dalam industri keuangan digital, yaitu bagaimana informasi disampaikan kepada publik melalui kanal digital, media sosial, dan pihak ketiga.

OJK menjelaskan bahwa latar belakang penyusunan aturan ini adalah pertumbuhan cepat produk jasa keuangan dan deras arus informasi yang beredar di ruang digital. Dalam situasi ketika pemasaran, edukasi, dan promosi sering bercampur dalam satu kanal, regulator melihat perlunya pengaturan yang lebih jelas agar informasi yang diterima masyarakat tidak menyesatkan dan tetap menjaga perlindungan konsumen. Fokus utamanya bukan pada penambahan perizinan, tetapi pada perilaku dalam penyampaian informasi.

Dari sisi substansi, rancangan ini menekankan bahwa setiap informasi harus disampaikan secara jujur, akurat, tidak menyesatkan, dan bertanggung jawab. OJK juga mulai menegaskan batas antara konten edukasi, materi pemasaran, dan rekomendasi, termasuk kewajiban transparansi atas kepentingan ekonomis dan penggunaan disclaimer untuk produk yang berisiko lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa regulator tidak hanya melihat isi pesan, tetapi juga konteks dan posisi pihak yang menyampaikan pesan tersebut.

Bagi industri fintech, salah satu poin yang paling relevan adalah soal tanggung jawab dalam kolaborasi dengan influencer atau pihak ketiga. OJK menegaskan bahwa selama ada hubungan kerja sama, tanggung jawab tetap berada pada PUJK. Artinya, model pemasaran digital yang selama ini banyak digunakan industri perlu dilihat ulang dari sisi kontrol, pengawasan, dan kejelasan peran. Di tengah pertumbuhan penggunaan KOL, influencer, dan kanal digital lain, titik ini akan menjadi semakin penting.

(Bersambung ke halaman berikutnya)



AFTECH melihat bahwa rancangan aturan ini akan berdampak langsung pada praktik pemasaran, literasi, dan tata kelola konten di banyak anggota. Karena itu, respons industri tidak cukup jika hanya melihatnya sebagai aturan komunikasi. Yang sedang dibentuk sebenarnya adalah standar perilaku baru untuk penyampaian informasi keuangan di ruang digital. Dalam konteks itu, koordinasi internal dan masukan tertulis dari anggota akan menjadi penting agar posisi industri dapat disampaikan secara utuh dan tetap sejalan dengan semangat perlindungan konsumen.



Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH dan APPARINDO Samakan Arah dalam Isu Strategis Asuransi Digital



AFTECH melakukan audiensi dengan APPARINDO pada 20 Februari 2026 untuk membahas penguatan sinergi di ekosistem insurtech dan penyelarasan posisi industri terhadap sejumlah isu regulasi strategis. Pertemuan ini menunjukkan bahwa kebutuhan koordinasi antarasosiasi semakin mendesak, terutama ketika perkembangan asuransi digital mulai memunculkan titik-titik persinggungan yang lebih kompleks antara pelaku konvensional, pelaku digital, dan regulator.

Salah satu benang merah yang muncul dalam diskusi adalah perlunya menyatukan persepsi industri sebelum masuk ke ruang advokasi kebijakan. AFTECH menekankan bahwa bila isu-isu strategis dibawa secara parsial, ada risiko timbulnya distorsi atau generalisasi yang justru merugikan ekosistem secara keseluruhan. Dalam konteks asuransi digital, hal ini terasa penting karena dinamika model bisnis berkembang cepat, sementara respons kebijakan sering kali masih mencoba menyesuaikan.

Beberapa isu prioritas dibahas cukup mendalam. Kewajiban bea meterai untuk produk microinsurance menjadi salah satu perhatian utama, terutama ketika nilai premi justru lebih kecil dari nominal meterai. Selain itu, wacana klasifikasi asuransi digital dalam kategori permodalan tertentu juga dipandang berpotensi memberi tekanan yang tidak proporsional bagi startup insurtech. Diskusi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang tanpa melihat karakter produk digital berisiko langsung memengaruhi keberlangsungan model bisnis dan keterjangkauan produk bagi masyarakat.

Dari sisi praktik industri, APPARINDO juga menyoroti keberadaan aggregator digital tanpa lisensi kepihalangan yang beroperasi menyerupai pialang resmi. Bagi kedua asosiasi, isu ini penting karena menyangkut fairness, tata kelola, dan reputasi industri. Jika dibiarkan, praktik semacam ini dapat menimbulkan kebingungan pasar sekaligus melemahkan disiplin terhadap standar perizinan. Pada saat yang sama, diskusi juga menyentuh persepsi regulator soal tingginya acquisition cost di distribusi digital, yang menurut pelaku industri perlu dipahami lebih proporsional.

(Bersambung ke halaman berikutnya)

Pertemuan ini tidak berhenti pada pertukaran pandangan. Ada pembahasan konkret mengenai kemungkinan MoU, regular meeting, pendalaman policy paper bea meterai, serta koordinasi menuju penyelenggaraan Insurtech Forum di paruh kedua 2026. Bagi AFTECH, langkah seperti ini penting untuk memastikan bahwa pembahasan soal asuransi digital tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dibangun di atas koordinasi yang lebih rapi, basis data yang lebih kuat, dan posisi kebijakan yang lebih selaras antar-pelaku industri.



Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH dan DJP Bahas Tata Kelola PSrE dan PJAP dalam Ekosistem Coretax



Pertemuan AFTECH dengan Direktorat Jenderal Pajak pada 24 Februari 2026 soal tata kelola PSrE dan PJAP menunjukkan bahwa transformasi perpajakan digital kini semakin menyentuh isu yang lebih mendasar, yaitu kepercayaan sistem dan kejelasan peran dalam ekosistem. Pembahasan ini menjadi penting karena pengembangan Coretax tidak hanya soal pembaruan teknologi, tetapi juga soal bagaimana seluruh unsur pendukungnya bekerja secara rapi, aman, dan akuntabel.

Dalam diskusi tersebut, AFTECH menekankan bahwa PSrE dan PJAP punya posisi yang semakin strategis. PJAP tidak lagi bisa dilihat sekadar sebagai kanal teknis, melainkan sebagai perantara yang memudahkan interaksi Wajib Pajak dengan sistem inti DJP. Sementara itu, PSrE berperan dalam memperkuat legitimasi transaksi digital melalui penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Namun pembahasan juga menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur digital belum otomatis berujung pada pemanfaatan yang optimal. Penggunaan PSrE, misalnya, masih menghadapi tantangan dari sisi adopsi, termasuk soal struktur biaya registrasi awal. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital bukan hanya soal ada atau tidaknya sistem, tetapi juga soal desain implementasi yang masuk akal bagi pengguna.

AFTECH juga membawa sejumlah masukan dari anggota PJAP, mulai dari kebutuhan standarisasi integrasi dengan Coretax, sinkronisasi pengembangan sistem, penanganan bug, hingga penguatan literasi publik soal peran PJAP. Semua ini penting karena ekosistem perpajakan digital yang sehat membutuhkan kejelasan fungsi, kepercayaan publik, dan jalur integrasi yang sah.

Dari pertemuan ini terlihat bahwa penguatan Coretax pada akhirnya bukan hanya proyek digitalisasi administrasi, tetapi bagian dari pembangunan tata kelola sistem perpajakan yang lebih kuat. Dalam konteks itu, dialog AFTECH dan DJP menjadi relevan karena menyentuh fondasi yang akan menentukan kualitas implementasi ke depan.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Cermati Pentingnya Respons Multipihak terhadap Penipuan Digital



Forum diskusi dan peluncuran policy brief yang digelar Mafindo pada 24 Februari 2026 memperlihatkan bahwa penipuan digital kini sudah berkembang jauh melampaui isu keamanan biasa. Bagi AFTECH, pembahasan ini penting karena ancaman yang dihadapi masyarakat dan industri keuangan digital semakin terstruktur, semakin canggih, dan semakin sulit ditangani bila masing-masing pihak bergerak sendiri-sendiri.

Salah satu benang merah yang kuat dari forum ini adalah pengakuan bahwa Indonesia sedang menghadapi eskalasi penipuan digital yang makin sistemik. Modus yang digunakan juga terus berkembang, mulai dari social engineering hingga pemanfaatan AI dan deepfake. Dalam situasi seperti ini, perlindungan konsumen tidak cukup hanya mengandalkan imbauan atau edukasi dasar, tetapi perlu didukung oleh desain sistem dan koordinasi antar-lembaga yang lebih kuat.

Dari sisi penegakan hukum, hambatan yurisdiksi lintas negara dan keterbatasan akses data pada tahap awal investigasi masih menjadi tantangan besar. Akibatnya, respons sering tertinggal dibanding kecepatan adaptasi pelaku kejahatan. Ini menunjukkan bahwa ekosistem perlindungan saat ini masih perlu diperkuat, baik dari sisi regulasi, mekanisme pelaporan, maupun teknologi pendukung.

Rekomendasi yang muncul dalam policy brief Mafindo juga mengarah ke pendekatan yang lebih proaktif, seperti sistem pelaporan terpadu, deteksi dini berbasis AI, penguatan literasi digital, dan kepastian hukum bagi institusi keuangan serta aparat penegak hukum. Bagi industri fintech, arah ini menjadi penting karena perlindungan konsumen ke depan akan semakin menuntut kombinasi antara teknologi, tata kelola, dan kolaborasi kebijakan.

Dari pembahasan ini terlihat bahwa penipuan digital tidak lagi bisa dipandang sebagai isu sektoral. Karena itu, keterlibatan AFTECH dalam forum seperti ini menjadi relevan sebagai bagian dari dorongan menuju model penanganan yang lebih terkoordinasi dan lebih siap menghadapi kompleksitas risiko digital yang terus berubah.

AFTECH dan BSSN Dorong Penguatan Ketahanan Siber Industri Fintech



Pertemuan AFTECH dengan Badan Siber dan Sandi Negara pada 25 Februari 2026 soal implementasi nota kesepahaman keamanan siber menunjukkan bahwa isu resiliensi digital kini semakin menjadi fondasi penting bagi industri fintech. Di tengah pertumbuhan layanan keuangan digital, penguatan keamanan siber tidak lagi bisa dilihat sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian inti dari kesiapan ekosistem.

Dalam diskusi tersebut, AFTECH dan BSSN membahas ruang lingkup kerja sama yang cukup luas, mulai dari penyusunan kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, pengamanan infrastruktur informasi, penanganan insiden, pembentukan CSIRT, kampanye literasi, pertukaran threat intelligence, hingga pilot project identitas digital. Ini menunjukkan bahwa keamanan siber semakin dipahami secara menyeluruh, bukan hanya sebagai isu teknis di level sistem.

Salah satu poin penting adalah dorongan kepada anggota AFTECH untuk mulai membentuk dan mendaftarkan CSIRT atau TTIS organisasi. Arah ini memperlihatkan bahwa ke depan, kesiapan sektor tidak hanya ditentukan oleh respons terpusat, tetapi juga oleh kemampuan masing-masing lembaga membangun mekanisme internal yang jelas untuk mendeteksi, merespons, dan memulihkan insiden.

Pembahasan ini juga menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan perkembangan kebijakan nasional, termasuk RUU Ketahanan dan Keamanan Siber. Dalam konteks itu, AFTECH memposisikan diri bukan semata sebagai pihak yang terdampak aturan, tetapi juga sebagai mitra yang siap memberi masukan agar kerangka kebijakan yang terbentuk tetap sesuai dengan kebutuhan industri.

Dari pertemuan ini terlihat bahwa implementasi kerja sama AFTECH dan BSSN bukan sekadar tindak lanjut formal, melainkan langkah yang menyentuh fondasi kepercayaan publik dan ketahanan sektor ke depan. Dalam ekosistem yang makin digital, isu ini akan semakin menentukan kualitas pertumbuhan industri.

AFTECH Konsolidasikan Agenda Advokasi dan Roadmap Pengembangan ICS



Gathering anggota bidang Innovative Credit Scoring pada 25 Februari 2026 menunjukkan bahwa pengembangan industri credit scoring alternatif kini semakin membutuhkan kepastian arah, baik dari sisi regulasi maupun tata kelola. Forum ini penting karena memperlihatkan bahwa tantangan sektor ICS tidak lagi hanya soal inovasi model, tetapi juga soal izin, penggunaan data, dan kesiapan kerangka governance yang lebih realistis.

Dalam pertemuan itu, AFTECH mulai mengonsolidasikan agenda kerja 2026 yang mencakup advokasi regulasi, penyusunan roadmap pengembangan PKA/ICS 2026–2028, serta pendalaman use case lintas sektor. Ini menunjukkan bahwa sektor ICS mulai bergerak dari fase eksplorasi menuju kebutuhan yang lebih kuat akan struktur dan kejelasan posisi dalam ekosistem jasa keuangan digital.

Salah satu isu yang paling mengemuka adalah proses perizinan ITSK yang masih dipandang menyimpan banyak tantangan, mulai dari timeline yang belum pasti, dokumen yang berulang, kendala teknis, hingga perubahan KBLI di tengah proses. Bagi industri yang masih dalam tahap berkembang, ketidakjelasan seperti ini sangat berpengaruh terhadap perencanaan bisnis dan kepercayaan pasar.

Di sisi lain, pembahasan soal penggunaan data untuk training dan validasi model juga menunjukkan bahwa sektor ICS sangat bergantung pada harmonisasi kebijakan. Perbedaan tafsir atas sumber data, kategori data, dan kebutuhan masa transisi governance memperlihatkan bahwa industri ini membutuhkan pendekatan yang bertahap, tidak seragam, dan lebih sesuai dengan realitas pengembangannya.

Dari forum ini terlihat bahwa masa depan ICS akan sangat ditentukan oleh kemampuan industri dan regulator menemukan titik temu antara inovasi, kehati-hatian, dan kepastian kebijakan. Karena itu, konsolidasi yang dilakukan AFTECH menjadi penting sebagai langkah membangun posisi industri yang lebih rapi dan lebih siap memasuki tahap pematangan ekosistem.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Dukung Sensus Ekonomi 2026 sebagai Penguatan Basis Data Ekonomi Digital



Keterlibatan AFTECH dalam kick off publisitas Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan BPS menunjukkan bahwa penguatan ekonomi digital tidak hanya membutuhkan inovasi dan regulasi, tetapi juga data yang lebih kuat. Dalam konteks transformasi ekonomi yang makin terdigitalisasi, hal ini menjadi penting karena kualitas kebijakan sangat bergantung pada kemampuan negara membaca perubahan struktur usaha secara akurat.

BPS menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan menjangkau lebih dari 30 juta pelaku usaha, termasuk sektor digital yang selama ini belum sepenuhnya terdokumentasi secara komprehensif. Ini relevan karena perkembangan ekonomi digital sering bergerak lebih cepat daripada instrumen statistik yang tersedia, sehingga banyak dinamika penting yang belum sepenuhnya tertangkap dalam data resmi.

Salah satu tantangan utama yang muncul adalah soal tingkat partisipasi dan kepercayaan pelaku usaha. Masih ada kekhawatiran bahwa data sensus akan beririsan dengan kepentingan perpajakan. Dalam titik ini, peran asosiasi seperti AFTECH menjadi penting karena asosiasi punya posisi yang cukup kuat untuk menjembatani komunikasi pemerintah dengan pelaku usaha.

Bagi ekosistem fintech, tersedianya basis data ekonomi yang lebih baik akan bermanfaat dalam jangka panjang, baik untuk perumusan kebijakan, penyusunan program inklusi, maupun pembacaan arah pasar. Dengan kata lain, sensus ekonomi bukan semata agenda statistik, tetapi bagian dari pembangunan fondasi pengetahuan yang akan memengaruhi kualitas kebijakan ke depan.

Dari pembahasan ini terlihat bahwa penguatan ekonomi digital pada akhirnya juga bergantung pada kualitas data yang dimiliki negara. Karena itu, keterlibatan AFTECH dalam mendukung Sensus Ekonomi 2026 relevan dilihat sebagai kontribusi terhadap pembangunan fondasi kebijakan yang lebih kuat dan lebih akurat.

AFTECH dan IARFC Bahas Penguatan Tata Kelola Finfluencer



Diskusi AFTECH dan IARFC Indonesia pada 27 Februari 2026 menunjukkan bahwa penyampaian informasi produk keuangan di ruang digital kini semakin menuntut standar yang lebih jelas. Di tengah berkembangnya peran finfluencer dan kanal digital sebagai pembentuk persepsi publik, isu yang muncul tidak lagi sekadar soal promosi, tetapi juga kompetensi, etika, dan tanggung jawab.

Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak menyoroti pentingnya standardisasi dan sertifikasi bagi influencer keuangan. Ini menjadi relevan karena semakin banyak konten keuangan beredar luas, sementara kualitas pemahaman atas risiko produk, tata kelola, dan kepatuhan belum selalu berjalan seiring dengan besarnya pengaruh pembuat konten. Dalam situasi seperti ini, finfluencer tidak bisa lagi diposisikan hanya sebagai kanal distribusi pesan.

Rencana AFTECH yang tengah menyiapkan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan membuka ruang kolaborasi dengan IARFC menunjukkan adanya pendekatan yang lebih substantif. Alih-alih berhenti pada kekhawatiran soal risiko informasi, pembahasan mulai diarahkan pada pembentukan parameter kompetensi yang lebih jelas dan dapat diakui industri.

Selain itu, diskusi mengenai revitalisasi FinPlan Digital dan entitas agregator anggota AFTECH memperlihatkan bahwa penguatan ekosistem tidak berhenti pada isu individu penyampai informasi. Ada kebutuhan yang lebih luas untuk menata model bisnis, memperkuat relevansi layanan, dan memastikan keberlanjutan ekosistem perencanaan keuangan digital.

Dari pertemuan ini terlihat bahwa tata kelola informasi keuangan di era digital akan semakin menuntut kombinasi antara edukasi, sertifikasi, dan penguatan ekosistem. Karena itu, peninjauan kerja sama AFTECH dan IARFC menjadi relevan sebagai langkah awal membangun standar perilaku dan kompetensi yang lebih kuat di lanskap keuangan digital.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

Konsolidasi Agenda Advokasi Industri Kripto 2026



Konsolidasi yang dilakukan AFTECH bersama anggota Departemen Aset Kripto pada 2 Maret 2026 menunjukkan bahwa industri kripto kini semakin membutuhkan ruang koordinasi yang lebih terarah. Di tengah dinamika regulasi yang terus berkembang, kebutuhan utama industri bukan hanya menyamakan pandangan internal, tetapi juga membangun posisi kebijakan yang lebih kuat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu isu yang paling menonjol dalam pertemuan ini adalah struktur perpajakan aset kripto, terutama wacana kenaikan tarif PPN yang dinilai dapat memberi tekanan langsung terhadap model bisnis pelaku industri. Dalam konteks ini, pembahasan tidak berhenti pada keberatan semata. Yang mulai dibangun justru adalah pendekatan advokasi yang lebih substantif, termasuk melalui rencana penyusunan kajian independen agar argumentasi industri memiliki dasar yang lebih kuat.

Selain soal perpajakan, perhatian juga diarahkan pada perkembangan regulasi penawaran aset digital seperti ICO dan IEO. Ini menjadi penting karena arah kebijakan yang sedang disiapkan regulator akan sangat memengaruhi ruang gerak industri ke depan. Dalam situasi seperti itu, AFTECH mengambil peran sebagai wadah konsolidasi agar pandangan yang dibawa ke ruang kebijakan tidak terfragmentasi, tetapi benar-benar merepresentasikan kebutuhan industri secara lebih utuh.

Pembahasan mengenai self-regulation juga menjadi salah satu sinyal menarik dari forum ini. Industri mulai melihat pentingnya panduan teknis internal, termasuk dalam merespons perkembangan teknologi seperti AI trading dan robo trading. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak hanya mendorong ruang inovasi, tetapi juga mulai menekankan pentingnya praktik kehati-hatian dan mitigasi risiko sebagai bagian dari penguatan tata kelola sektor.

Dari pertemuan ini terlihat bahwa agenda advokasi industri kripto tidak lagi bisa dibangun secara sporadis. Ia membutuhkan konsolidasi, kedalaman substansi, dan kesiapan membangun standar internal. Dalam konteks itu, langkah AFTECH menjadi penting sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi industri di tengah lanskap kebijakan yang semakin kompleks.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

Indonesia Fintech Playbook Perluas Jembatan Kolaborasi dengan Australia



Kebutuhan akan referensi yang lebih jelas mengenai ekosistem fintech Indonesia semakin penting dalam mendorong kolaborasi lintas negara. Peluncuran Indonesia Fintech Playbook pada 12 Maret 2026 menjawab kebutuhan itu dengan menghadirkan gambaran yang lebih terstruktur mengenai lanskap regulasi, karakter pasar, dan pendekatan kolaboratif di industri fintech Indonesia.

Bagi mitra internasional, masuk ke pasar Indonesia tidak cukup hanya dengan melihat ukuran pasar atau laju pertumbuhan digitalnya. Ada kebutuhan untuk memahami bagaimana ekosistem bekerja dalam praktik, termasuk relasi antara pelaku industri, regulator, dan kebutuhan pasar yang berkembang cukup cepat. Dalam konteks itulah playbook ini menjadi relevan.

Pembahasan dalam peluncuran juga memperlihatkan bahwa Indonesia dan Australia memiliki ruang kerja sama yang cukup jelas. Australia membawa keunggulan dalam teknologi dan pengembangan solusi digital, sementara Indonesia menawarkan pasar yang besar dan tingkat adopsi digital yang tinggi. Kombinasi ini membuka peluang kerja sama yang cukup luas, termasuk di bidang infrastruktur digital, manajemen risiko, dan open finance.

Dalam konteks yang lebih luas, kehadiran playbook seperti ini membantu membangun dasar yang lebih kuat bagi peninjauan kerja sama internasional. Bukan hanya dari sisi promosi pasar, tetapi juga dari sisi pemahaman yang lebih utuh mengenai cara masuk dan beroperasi di ekosistem fintech Indonesia.



Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Perkuat Hubungan dengan Media melalui Kunjungan ke Bloomberg Technoz



Pemberitaan mengenai fintech masih kerap bergerak dalam ruang yang sempit dan cukup sering didominasi oleh isu-isu kasuistik. Karena itu, kebutuhan untuk membuka dialog yang lebih langsung dengan media menjadi semakin penting. Hal ini menjadi salah satu latar belakang kunjungan ke Bloomberg Technoz pada 12 Maret 2026.

Salah satu poin yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah masih terbatasnya cakupan pemberitaan fintech di media, terutama jika dibandingkan dengan kompleksitas model bisnis dan isu strategis yang berkembang di industri. Kondisi ini membuat ruang komunikasi yang lebih aktif antara industri dan media menjadi relevan, agar pembahasan yang muncul di publik tidak hanya bertumpu pada isu negatif atau kasus tertentu.

Keterlibatan sejumlah anggota dalam kunjungan ini juga memberi kesempatan bagi media untuk melihat lebih dekat ragam model bisnis yang ada di dalam ekosistem fintech. Ini penting karena pemahaman yang lebih baik di tingkat redaksi akan berpengaruh pada cara industri dibaca dan diberitakan ke publik.

Dalam jangka yang lebih panjang, hubungan dengan media tidak cukup dilihat sebagai kebutuhan eksposur. Ia juga terkait dengan kualitas komunikasi publik. Semakin baik ruang dialog yang dibangun, semakin besar peluang hadirnya pemberitaan yang lebih berimbang dan lebih membantu publik memahami perkembangan industri secara utuh.



Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH dan Kementerian Ekonomi Kreatif Bahas Kolaborasi Pembiayaan dan Infrastruktur Digital



Peluang kolaborasi antara fintech dan sektor ekonomi kreatif mulai dibahas dalam kerangka yang lebih konkret pada 12 Maret 2026. Fokus pembahasannya tidak lagi berhenti pada gagasan umum, tetapi mulai mengarah pada area yang lebih jelas, terutama pembiayaan, monetisasi kekayaan intelektual, dan penguatan infrastruktur digital.

Salah satu topik yang cukup menonjol adalah pemanfaatan tokenisasi dan aset digital berbasis blockchain untuk mendukung monetisasi kekayaan intelektual. Pendekatan ini menarik karena menawarkan kemungkinan baru bagi pelaku kreatif dalam mengelola nilai ekonomi dari karya mereka, terutama ketika skema yang tersedia saat ini belum selalu menjawab kebutuhan.

Dari sisi pembiayaan, pembahasan juga menyentuh kemungkinan penggunaan kanal fintech untuk pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, termasuk model alternatif seperti revenue-based financing. Ini menjadi relevan karena pelaku ekonomi kreatif sering menghadapi kendala ketika harus masuk ke jalur pembiayaan yang lebih konvensional.

Selain itu, pembahasan mengenai pembayaran digital menunjukkan bahwa kebutuhan sektor kreatif tidak hanya terkait dengan akses modal. Integrasi sistem pembayaran, efisiensi transaksi lintas negara, dan distribusi royalti juga menjadi bagian penting dari ekosistem yang perlu diperkuat agar monetisasi karya dapat berjalan lebih efisien.



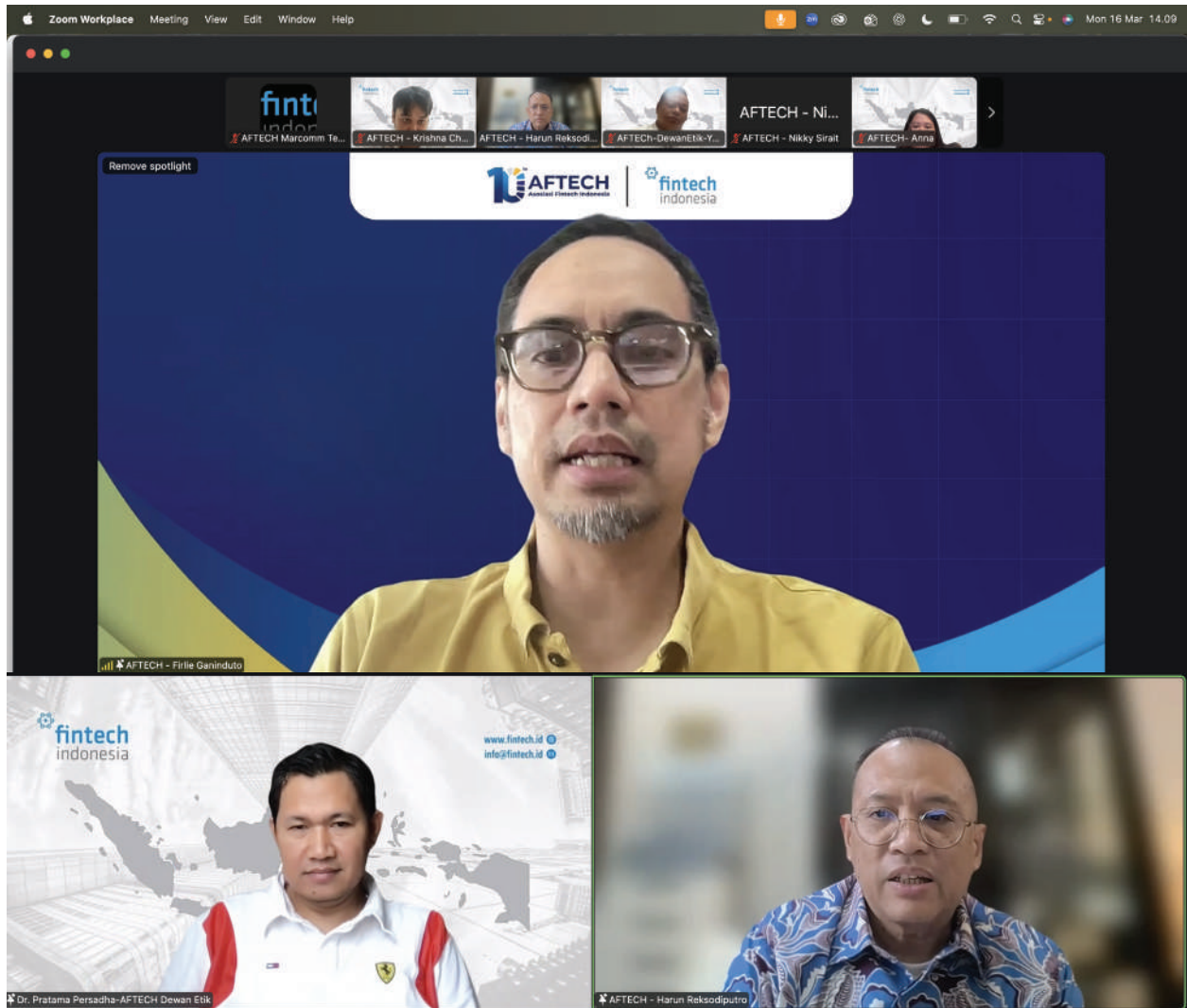
Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Perkuat Fondasi Tata Kelola melalui Sosialisasi Kode Etik Terintegrasi



Kebutuhan untuk memperkuat tata kelola industri fintech semakin mengemuka seiring berkembangnya kompleksitas layanan keuangan digital dan meningkatnya tuntutan terhadap integritas pelaku usaha. Dalam konteks itu, AFTECH menggelar Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Teknologi Finansial di Sektor Jasa Keuangan yang Bertanggung Jawab pada 16 Maret 2026, yang diikuti sekitar 100 perwakilan anggota secara daring.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari implementasi Kode Etik Terintegrasi yang telah disusun dan disahkan AFTECH. Melalui sambutan pembuka Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, ditekankan bahwa kode etik bukan sekadar dokumen normatif, tetapi pedoman perilaku dan tata kelola yang perlu dijalankan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab oleh seluruh anggota. Paparan yang dilanjutkan oleh Dewan Kehormatan dan Etik AFTECH juga memperjelas ruang lingkup penerapan kode etik, prinsip etika dasar, mekanisme penanganan pelanggaran, serta peran Dewan Etik dalam menjaga integritas industri.



Di titik ini, pembahasan mengenai kode etik menjadi relevan karena industri fintech tidak hanya dituntut tumbuh cepat, tetapi juga menunjukkan kedewasaan kelembagaan. Peningkatan pemahaman anggota terhadap prinsip good governance, kepatuhan regulasi, perlindungan konsumen, serta akuntabilitas menjadi fondasi penting untuk membangun ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Keseragaman pemahaman di antara anggota juga dibutuhkan agar standar etika industri tidak berhenti pada tataran prinsip, melainkan benar-benar menjadi bagian dari praktik usaha sehari-hari.

Selain sosialisasi kode etik, AFTECH juga memperkenalkan Regulatory Compliance System (RCS) yang dikembangkan bersama HukumOnline. Kehadiran alat ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola tidak hanya dibangun melalui norma, tetapi juga melalui instrumen pendukung yang membantu anggota memahami dan memantau perkembangan regulasi. Dalam konteks yang lebih luas, langkah ini memperlihatkan arah AFTECH untuk memperkuat peran self-regulatory organization sekaligus membangun kepercayaan yang lebih kuat dari regulator, investor, dan masyarakat terhadap industri fintech Indonesia.

Kegiatan Pengurus

Dewan Etik AFTECH Susun Agenda Kerja 2026



Pembahasan mengenai evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan arah program kerja tahun 2026 menjadi fokus dalam Rapat Rencana Kerja Dewan Kehormatan/Etik AFTECH yang diselenggarakan pada 20 Januari 2026 di Restoran Kembang Goela, Jakarta. Rapat ini dipimpin oleh Harun Reksodiputro selaku Ketua Dewan Kehormatan/Etik AFTECH.

Selain Harun, hadir Wemmy Muharamsyah, Dr. Pratama Persada, Krishna Chandra, dan Yudho Giri sebagai anggota Dewan Kehormatan/Etik AFTECH. Dari pihak Sekretariat AFTECH turut hadir Mercy Simorangkir dan Abyn Prima Rizki. Kehadiran lengkap ini memberi ruang yang cukup untuk meninjau capaian 2025 sekaligus menetapkan prioritas untuk tahun berjalan.

Pokok pembahasan rapat meliputi rekap kegiatan Dewan Etik sepanjang 2025, termasuk pelaksanaan hearing atau sidang etik, audiensi dengan regulator, serta penyusunan Kode Etik Terintegrasi AFTECH yang telah disetujui dan tersedia dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Di samping itu, rapat juga menegaskan pentingnya menjaga independensi Dewan Etik agar tidak diposisikan sebagai perpanjangan tangan regulator, melainkan tetap berfokus pada pembinaan dan penegakan etika internal industri.

Pembahasan kemudian berkembang pada prioritas sosialisasi Kode Etik di kuartal I 2026, pemanfaatan teknologi seperti chatbot atau AI untuk mendukung sosialisasi dengan prinsip human oversight, penyusunan dan pembaruan Code of Conduct per klaster bisnis, hingga pembaruan SOP dan hukum acara Dewan Etik. Rapat juga menyoroti perlunya penyusunan roadmap industri 3–5 tahun serta penguatan strategi komunikasi dan edukasi publik melalui webinar, podcast dan forum eksternal.

Sebagai tindak lanjut, materi sosialisasi Kode Etik dan Code of Conduct akan disiapkan pada Januari 2026 dengan target pelaksanaan utama pada Januari hingga Maret 2026. Selain itu, Dewan Etik akan menyiapkan pengesahan pedoman organisasi dan SOP sebagai dasar formal pelaksanaan tugas, serta mempersiapkan partisipasi dalam forum eksternal strategis seperti Governance Summit OJK dan rencana audiensi dengan Komite Audit OJK.

Kegiatan Pengurus

AFTECH dan Anggota EWA Selaraskan Agenda Advokasi 2026



Penyelarasan agenda advokasi dan penguatan arah program kerja menjadi fokus dalam Coffee Morning Departemen Earned Wage Access (EWA) AFTECH bersama anggota EWA yang digelar pada 3 Februari 2026 di Livingstone SCBD. Kegiatan ini dihadiri Ketua Departemen EWA AFTECH Ade Yuanda, perwakilan enam dari delapan perusahaan EWA anggota AFTECH, serta perwakilan Sekretariat AFTECH.

Selain menjadi ajang silaturahmi, pertemuan ini dimanfaatkan untuk menyamakan pandangan anggota mengenai agenda advokasi prioritas, menyusun daftar kebutuhan fasilitasi bagi penyelenggara EWA, serta membahas strategi program kerja Departemen EWA tahun 2026. Diskusi berlangsung dalam konteks model bisnis EWA yang hingga kini masih berjalan tanpa kerangka regulasi yang spesifik maupun endorsement regulator yang relevan.

Dalam pembahasan, mengemuka bahwa endorsement yang pernah diberikan OJK melalui Regulatory Sandbox pada periode 2021–2022 tidak lagi memadai untuk mendukung kerja sama penyelenggara EWA dengan lembaga keuangan, khususnya perbankan, maupun perusahaan di sektor riil. Tingkat adopsi layanan EWA juga disebut masih bervariasi di berbagai sektor, sangat bergantung pada kesiapan perusahaan pemberi kerja serta struktur pendanaan yang digunakan. Pada saat yang sama, keberlanjutan model bisnis EWA menghadapi tantangan likuiditas, kebutuhan endorsement yang lebih kuat, serta pentingnya dukungan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memitigasi risiko gagal bayar dari perusahaan pengguna layanan.

Diskusi juga menekankan bahwa layanan EWA bukan produk pinjaman, melainkan alternatif pembiayaan bagi pegawai melalui mekanisme penarikan sebagian upah di muka tanpa bunga. Namun, ketidakseragaman narasi dan praktik industri berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atas nilai tambah model bisnis ini di mata publik dan regulator. Karena itu, prioritas program kerja 2026 diarahkan pada penyusunan panduan teknis tata kelola EWA, penguatan narasi dan komunikasi publik, pengembangan standar pertukaran serta validasi data, penyusunan roadmap industri lima tahun, dan pengenalan layanan EWA pada perusahaan labour intensive melalui kolaborasi dengan asosiasi seperti APINDO dan KADIN. Sebagai langkah lanjut, Departemen EWA AFTECH akan menggelar diskusi dengan Arsjad Rasjid, menyusun panduan teknis AFTECH bagi layanan EWA, memperkuat narasi media, serta mendorong penguatan riset dan infrastruktur pendukung layanan ini.

Kegiatan Pengurus

AFTECH dan Departemen PJAP Bahas Strategi Advokasi Tahun 2026



Penyelarasan program kerja dan strategi advokasi Departemen Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan Wakil Ketua Umum I AFTECH dengan Departemen PJAP yang diselenggarakan pada 4 Februari 2026 di Nur Corner Senopati. Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Eksekutif dan Senior Policy Associate dari Sekretariat AFTECH, serta enam dari tujuh penyelenggara PJAP yang saat ini beroperasi di pasar.

Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyamakan arah langkah advokasi pada 2026, khususnya atas isu-isu prioritas yang dihadapi para penyelenggara PJAP. Dalam diskusi, disepakati bahwa Departemen PJAP AFTECH akan menjadi wadah advokasi utama, sehingga tidak diperlukan pembentukan asosiasi terpisah untuk model bisnis ini.

Beberapa isu utama yang mengemuka meliputi kondisi persaingan usaha yang dinilai belum sehat karena adanya dominasi oleh salah satu perusahaan PJAP, keterbatasan akses untuk pengembangan aplikasi pendukung, komunikasi Direktorat Jenderal Pajak yang dinilai belum optimal terutama ketika terjadi perubahan kebijakan tanpa konsultasi industri yang memadai, serta kebutuhan akan landasan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggara PJAP. Peraturan yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya optimal dan belum sepenuhnya dapat diterima oleh lembaga jasa keuangan lainnya.

Pertemuan ini juga menghasilkan sejumlah langkah tindak lanjut. Penyelenggara PJAP yang belum menjadi anggota AFTECH menyatakan komitmen untuk bergabung dan terlibat aktif dalam program Departemen PJAP. Selain itu, menjelang rencana audiensi dengan Dirjen Pajak, para penyelenggara akan membantu menyiapkan bahan yang perlu disampaikan, termasuk permasalahan komunikasi, pengembangan teknologi, dan dukungan regulasi. Dalam waktu dekat, terdapat kebutuhan untuk memperkuat landasan hukum model bisnis PJAP melalui peningkatan dasar pengaturannya dari Peraturan Direktur Jenderal menjadi Peraturan Menteri Keuangan.

Kegiatan Pengurus

AFTECH dan Bank Indonesia Bahas Arah Kolaborasi FEKDI x IFSE 2026



Audiensi AFTECH dengan Bank Indonesia pada 25 Februari 2026 terkait FEKDI x IFSE 2026 memperlihatkan bahwa agenda penguatan ekosistem digital kini semakin diarahkan pada program yang fokus, terukur, dan punya dampak nyata. Pertemuan ini penting karena menunjukkan bahwa regulator mulai semakin selektif melihat kualitas program, bukan sekadar banyaknya kegiatan yang diselenggarakan.

Dalam pembahasan tersebut, Bank Indonesia menekankan tiga fokus utama, yaitu inovasi, sinergi, dan capacity building. Arah ini memberi pesan bahwa forum ekosistem digital ke depan akan semakin dinilai dari kontribusinya terhadap pengembangan talenta, penguatan sistem pembayaran, dan kemampuan menghubungkan berbagai inisiatif yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

Bagi AFTECH, pendekatan ini membuka ruang yang cukup strategis. Integrasi antara FEKDI, IFSE, dan rangkaian program seperti Bulan Fintech Nasional berpotensi menciptakan narasi yang lebih utuh bagi ekosistem. Selama ini, banyak agenda regulator dan industri berjalan paralel, tetapi belum selalu terkoneksi dalam kerangka besar yang sama. Dengan ruang integrasi yang lebih terbuka, nilai tambahnya bisa menjadi jauh lebih konkret.

Dukungan Bank Indonesia yang diarahkan pada kolaborasi non-anggaran, seperti narasumber, komunikasi, dan publikasi, juga menunjukkan bahwa kemitraan regulator dan asosiasi tidak selalu bergantung pada dukungan finansial langsung. Dalam banyak kasus, dukungan legitimasi substansi dan penyelarasan agenda justru bisa menjadi faktor yang lebih strategis.

Dari audiensi ini terlihat bahwa hubungan AFTECH dan Bank Indonesia semakin bergerak ke arah kemitraan yang lebih substantif. Karena itu, pembahasan FEKDI x IFSE 2026 penting dilihat bukan hanya sebagai persiapan event, tetapi sebagai upaya menyatukan agenda transformasi sistem pembayaran dan ekonomi digital dalam satu kerangka yang lebih fokus.

Kegiatan Pengurus

Penguatan Ketahanan Siber melalui Sosialisasi Pedoman Keamanan Siber



Sosialisasi Pedoman Keamanan Siber AFTECH pada 5 Maret 2026 menegaskan bahwa keamanan siber semakin menjadi isu mendasar dalam perkembangan industri fintech. Di tengah percepatan digitalisasi layanan keuangan, pembahasan soal keamanan teknologi tidak lagi bisa ditempatkan sebagai urusan teknis semata, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.

Dalam kegiatan ini, AFTECH mendorong anggotanya untuk memandang keamanan siber sebagai komponen yang melekat pada kesiapan organisasi. Semakin berkembangnya layanan digital memang membawa efisiensi dan perluasan akses, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan eksposur terhadap ancaman yang semakin kompleks. Karena itu, penguatan ketahanan siber perlu dibangun secara sadar dan sistematis, bukan hanya sebagai respons atas insiden.

Pedoman yang disusun AFTECH menarik karena mengadopsi pendekatan yang fleksibel dan proporsional. Ini penting mengingat tingkat kesiapan tiap perusahaan tidak selalu sama. Dengan prinsip seperti risk-based approach, zero trust architecture, secure by design, dan privacy by design, pedoman ini memberi arah yang jelas sekaligus tetap memberi ruang bagi perusahaan untuk menyesuaikan implementasinya dengan skala dan kebutuhan masing-masing.

Yang juga penting, inisiatif ini tidak berhenti pada penyampaian dokumen semata. Ada dorongan agar anggota terus meningkatkan kapasitas SDM, berbagi praktik terbaik, dan melakukan penyesuaian berkala seiring berkembangnya teknologi dan dinamika ancaman siber. Ini menunjukkan bahwa keamanan siber dipahami sebagai proses yang terus bergerak, bukan target yang selesai dalam satu tahap.

Dari kegiatan ini terlihat bahwa AFTECH sedang mendorong anggotanya untuk menempatkan keamanan siber sebagai fondasi pertumbuhan industri. Dalam ekosistem keuangan digital yang semakin kompleks, pendekatan seperti ini menjadi penting agar inovasi tetap berjalan di atas dasar tata kelola yang kuat.

Kegiatan Pengurus

Kunjungan ke OTTO Digital Soroti Tantangan Model Bisnis Agregator



Model bisnis agregator semakin relevan di tengah kebutuhan pengguna akan layanan keuangan digital yang lebih terintegrasi. Hal ini menjadi salah satu pokok pembahasan dalam kunjungan ke OTTO Digital pada 13 Maret 2026, yang digunakan untuk mendalami perkembangan model bisnis agregator dan tantangan yang masih dihadapi di lapangan.

Dari paparan yang disampaikan, terlihat bahwa agregator menawarkan kemudahan dengan menghubungkan berbagai layanan seperti pembayaran, pembiayaan, investasi, dan asuransi dalam satu platform. Model ini menjawab kebutuhan pasar yang menginginkan akses yang lebih praktis dan lebih sederhana dalam menggunakan layanan keuangan digital.

Namun dalam praktiknya, tantangan regulasi masih cukup terasa. Kerangka yang ada dinilai belum selalu sepenuhnya sesuai dengan karakter operasional bisnis agregator. Karena itu, kebutuhan untuk membuka ruang diskusi yang lebih khusus dengan regulator menjadi semakin relevan, agar isu implementasi tidak terus menumpuk di tingkat pelaku usaha.

Selain itu, kebutuhan penguatan kapasitas internal juga menjadi perhatian, terutama dalam bidang kepatuhan dan tata kelola. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan model agregator tidak hanya bertumpu pada inovasi produk, tetapi juga pada kesiapan organisasi dalam memenuhi ekspektasi regulator dan menjaga kualitas operasional.



Kegiatan Pengurus

Pelantikan Dewan Komisiner OJK Baru Buka Ruang Penguatan Hubungan Kelembagaan dengan Industri



Perubahan kepemimpinan di tingkat regulator selalu menjadi momentum penting bagi industri jasa keuangan, terutama ketika sektor ini sedang bergerak dalam fase transformasi yang semakin cepat. Dalam konteks itu, AFTECH menghadiri kegiatan Pengucapan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Anggota Dewan Komisiner OJK di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pada 25 Maret 2026, yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto.

Pengucapan sumpah jabatan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, kepada tujuh Anggota Dewan Komisiner OJK yang baru berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 30/P Tahun 2026. Dengan susunan kepemimpinan baru tersebut, OJK menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat perlindungan konsumen, mendorong pendalaman pasar keuangan, serta mengawal transformasi sektor jasa keuangan nasional sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Yang mengemuka dari momentum ini bukan hanya pergantian struktur kepemimpinan, tetapi juga arah kebijakan yang akan membentuk interaksi antara regulator dan industri ke depan. Penekanan OJK pada sinergi, pengawasan terintegrasi, perlindungan konsumen, dan pengembangan inovasi teknologi sektor keuangan menunjukkan bahwa ruang dialog dengan pelaku industri akan tetap menjadi kebutuhan utama. Bagi ekosistem fintech, hal ini relevan karena perkembangan inovasi digital, aset keuangan digital, dan model bisnis baru memerlukan pendekatan pengawasan yang adaptif sekaligus terukur.

Bagi AFTECH, pelantikan ini menjadi titik awal yang penting untuk melanjutkan dan memperkuat hubungan kelembagaan dengan OJK, khususnya dengan jajaran yang akan memegang peran strategis di bidang inovasi teknologi sektor keuangan dan perlindungan konsumen. Karena itu, langkah lanjutan seperti pengajuan audiensi awal, forum dialog resmi, dan konsolidasi isu-isu implementasi regulasi di tingkat anggota menjadi semakin relevan. Dalam konteks yang lebih luas, hubungan yang terbangun dengan baik antara asosiasi dan regulator akan sangat menentukan kualitas arah kebijakan serta kesiapan industri dalam menjawab perubahan yang terus berkembang.

Kegiatan Pengurus

Dukungan Pemeringkat Kredit Alternatif Menguat dalam Pengembangan Ekonomi Daerah Jawa Timur



Kebutuhan untuk memperluas akses pembiayaan sektor produktif daerah semakin menuntut pendekatan yang lebih adaptif terhadap karakter usaha di lapangan. Dalam konteks itu, AFTECH menghadiri Focus Group Discussion yang diselenggarakan OJK Provinsi Jawa Timur pada 31 Maret 2026 secara daring, dengan salah satu fokus pembahasan pada potensi dukungan industri Pemeringkat Kredit Alternatif dalam Program Pengembangan Ekonomi Daerah Jawa Timur 2026.

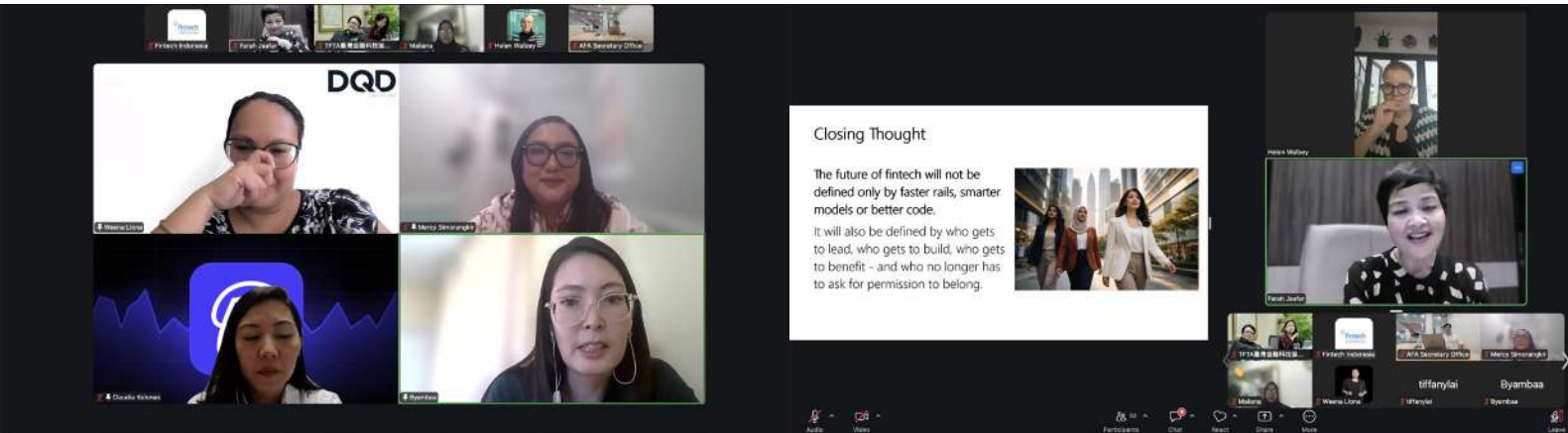
Program ini diarahkan pada pengembangan ekosistem sektor produktif daerah, khususnya komoditas susu sapi perah di wilayah Malang Raya. Dalam diskusi tersebut, mengemuka bahwa salah satu tantangan utama pembiayaan sektor produktif adalah keterbatasan data dan akses kredit formal bagi pelaku usaha. Di titik inilah pemanfaatan data alternatif untuk credit scoring dinilai memiliki relevansi yang semakin besar, karena dapat membuka peluang akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha yang selama ini belum sepenuhnya terlayani oleh skema pembiayaan konvensional.

Pembahasan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa peran teknologi finansial tidak hanya terkait dengan layanan digital di kawasan perkotaan atau kebutuhan konsumen ritel, tetapi juga dapat masuk ke sektor produktif daerah dengan tantangan yang sangat spesifik. Dukungan OJK terhadap melibatkan industri Pemeringkat Kredit Alternatif melalui pendekatan bertahap, termasuk pilot project, backtesting model credit scoring, dan integrasi sistem dengan lembaga jasa keuangan, memperlihatkan bahwa pengembangan ekosistem pembiayaan produktif memerlukan proses implementasi yang hati-hati dan berbasis pembelajaran.

AFTECH sendiri menyampaikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi daerah sekaligus kesiapan industri Pemeringkat Kredit Alternatif untuk berkontribusi melalui pemanfaatan data alternatif dan teknologi credit scoring. Dalam konteks yang lebih luas, keterlibatan industri fintech dalam skema seperti ini membuka ruang bagi inklusi keuangan yang lebih substantif, karena tidak hanya memperluas akses layanan, tetapi juga membantu menjembatani kebutuhan pembiayaan dengan karakter ekonomi daerah yang nyata.

Kegiatan Pengurus

AFA Women in FinTech Perkuat Ruang Dialog tentang Kepemimpinan Perempuan di Industri



Pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan dalam industri fintech semakin bergerak ke arah yang lebih substantif, seiring meningkatnya kebutuhan akan ekosistem yang lebih inklusif dan lebih mendukung keberagaman perspektif. Hal ini terlihat dalam webinar AFA Women in FinTech bertema *Leading Without Limits: Equity, Identity & Impact* yang diselenggarakan secara virtual pada 31 Maret 2026, dengan AFTECH turut mengambil peran aktif dalam pelaksanaannya.

Dalam kegiatan ini, Executive Director AFTECH Mercy Simorangkir bertindak sebagai moderator, sementara Wakil Ketua Umum IV AFTECH sekaligus Co-Founder Pluang, Claudia Kolonas, hadir sebagai narasumber. Diskusi membahas berbagai isu yang cukup luas, mulai dari tantangan kepemimpinan perempuan di sektor teknologi dan keuangan, persepsi dan bias dalam kepemimpinan, pengalaman perempuan dalam organisasi global, peran mentorship, hingga keseimbangan antara karier dan kehidupan pribadi di industri yang bertumbuh cepat seperti fintech.

Yang penting dari pembahasan ini adalah pergeseran fokus dari sekadar representasi menuju penguatan kapasitas kepemimpinan. Artinya, isu perempuan dalam fintech tidak lagi hanya dilihat dari sisi jumlah partisipasi, tetapi juga dari bagaimana industri menciptakan ruang yang memungkinkan perempuan berkembang, memimpin, dan memberi pengaruh pada arah inovasi serta pengambilan keputusan. Dalam konteks regional, forum seperti ini juga membuka ruang pertukaran pengalaman yang lebih luas di antara pelaku fintech Asia.

Partisipasi AFTECH dalam inisiatif ini menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum regional tidak hanya berkaitan dengan kerja sama industri, tetapi juga dengan pembentukan agenda yang lebih inklusif bagi masa depan ekosistem fintech. Ke depan, penajakan pengembangan program Women in FinTech di tingkat nasional menjadi relevan dilihat sebagai bagian dari pengembangan talenta dan kepemimpinan industri. Dalam konteks yang lebih luas, semakin kuat ruang pengembangan kepemimpinan perempuan, semakin besar pula peluang lahirnya industri fintech yang lebih beragam, lebih adaptif, dan lebih inklusif.

AFTECH Hadiri Koordinasi dengan OJK terkait Peserta Sandbox



Koordinasi antara asosiasi dan regulator kembali menjadi bagian penting dari penguatan ekosistem keuangan digital. Hal itu tercermin dalam rapat yang dihadiri AFTECH bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 12 Januari 2026 di Gedung Soemitro Djohadikusumo, Jakarta, terkait peserta regulatory sandbox yang tidak melanjutkan proses pendaftaran setelah masa berlaku surat rekomendasi berakhir. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Lutfi Alkatiri, Deputi Direktur Inovasi Keuangan Digital OJK, sementara AFTECH diwakili oleh Mercy Simorangkir, Abynprima Rizki, tim policy dan tim community development dari sekretariat AFTECH.

Dalam rapat itu, OJK menyampaikan hasil pemantauan terhadap dua entitas yang tidak melanjutkan pendaftaran pasca-sandbox, yakni PT Cekaja Merdeka Keuangan dan PT Kreasi Finansial Mediatama. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar pembahasan lebih lanjut mengenai status dan tindak lanjut terhadap kedua entitas dimaksud.

Menanggapi hal itu, AFTECH menjelaskan bahwa merujuk pada AD/ART AFTECH, kedua entitas tersebut sudah tidak lagi menjadi anggota AFTECH sejak Desember 2023 karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran keanggotaan. AFTECH juga telah melakukan komunikasi kepada keduanya, namun hanya PT Kreasi Finansial Mediatama yang memberikan respons, sedangkan PT Cekaja Merdeka Keuangan belum memberikan tanggapan.

Dalam perkembangannya, PT Kreasi Finansial Mediatama turut menyampaikan adanya pivot model bisnis menjadi Financial Planner yang masuk kategori PJTI. Di sisi lain, AFTECH juga memaparkan temuan bahwa aktivitas media sosial kedua entitas masih mencantumkan model bisnis sebagai aggregator. Menyikapi informasi tersebut, OJK menyampaikan akan melakukan pemanggilan lanjutan terhadap kedua entitas dengan mempertimbangkan data dan informasi yang telah disampaikan AFTECH.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Berpartisipasi dalam Riset Keamanan Siber UMKM oleh ICT Watch



Isu keamanan siber bagi UMKM menjadi salah satu pembahasan yang mengemuka dalam wawancara riset yang dilakukan ICT Watch dan diikuti AFTECH pada 13 Januari 2026. Dalam kegiatan ini, AFTECH dihadiri oleh Pratama, Anggota Dewan Etik AFTECH, serta Marshall Pribadi, Wakil Ketua Umum I AFTECH. Dari pihak ICT Watch hadir Indriyatno Banyumurti, Defira, dan Widuri.

ICT Watch menjelaskan bahwa studi ini didukung oleh APAC Cybersecurity Fund - The Asia Foundation dan ditujukan untuk memberikan analisis mendalam mengenai ekosistem keamanan siber UMKM di Indonesia. Dari studi tersebut diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang dapat disinergikan, baik di tingkat nasional maupun regional.

Rangkaian kegiatan riset ini mencakup desk research & ecosystem mapping, key informant interviews, FGD daring, policy dialogue, hingga kontribusi pada agenda regional. Dalam kesempatan itu, AFTECH menyampaikan bahwa UMKM kini semakin digital, namun aspek keamanan siber masih tertinggal. AFTECH juga menjelaskan berbagai inisiatif yang telah dilakukan, antara lain penyusunan panduan implementasi keamanan siber bagi anggota AFTECH, serta kegiatan advokasi dan edukasi terkait keamanan siber di sektor fintech.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Pratama yang menekankan bahwa isu keamanan dan ketahanan siber di sektor UMKM perlu menjadi perhatian besar, mengingat sektor ini merupakan penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai tindak lanjut, ICT Watch menyampaikan permohonan partisipasi aktif AFTECH kembali dalam FGD maupun policy dialogue mendatang, sementara kemungkinan kolaborasi formal antara AFTECH dan ICT Watch juga menjadi bahan pertimbangan DPH.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Ikut FGD Pemutakhiran Kurikulum Program Doktor Prasetiya Mulya



Keterlibatan AFTECH dalam ruang akademik kembali terlihat melalui partisipasinya dalam Focus Group Discussion pemutakhiran kurikulum Program Doktor (S3) Universitas Prasetiya Mulya yang diselenggarakan pada 13 Januari 2026 di Kampus Cilandak. FGD ini dipimpin oleh Koordinator Program Doktor S3 Universitas Prasetiya Mulya, yakni Dr. Yane Chandra, Dr. Handyanto Widjojo, dan Prof. Elliot Simangunsong, Ph.D., sementara AFTECH diwakili oleh Wakil Ketua Umum AFTECH Anggi Ariningsih, dengan dukungan tim policy dari sekretariat AFTECH.

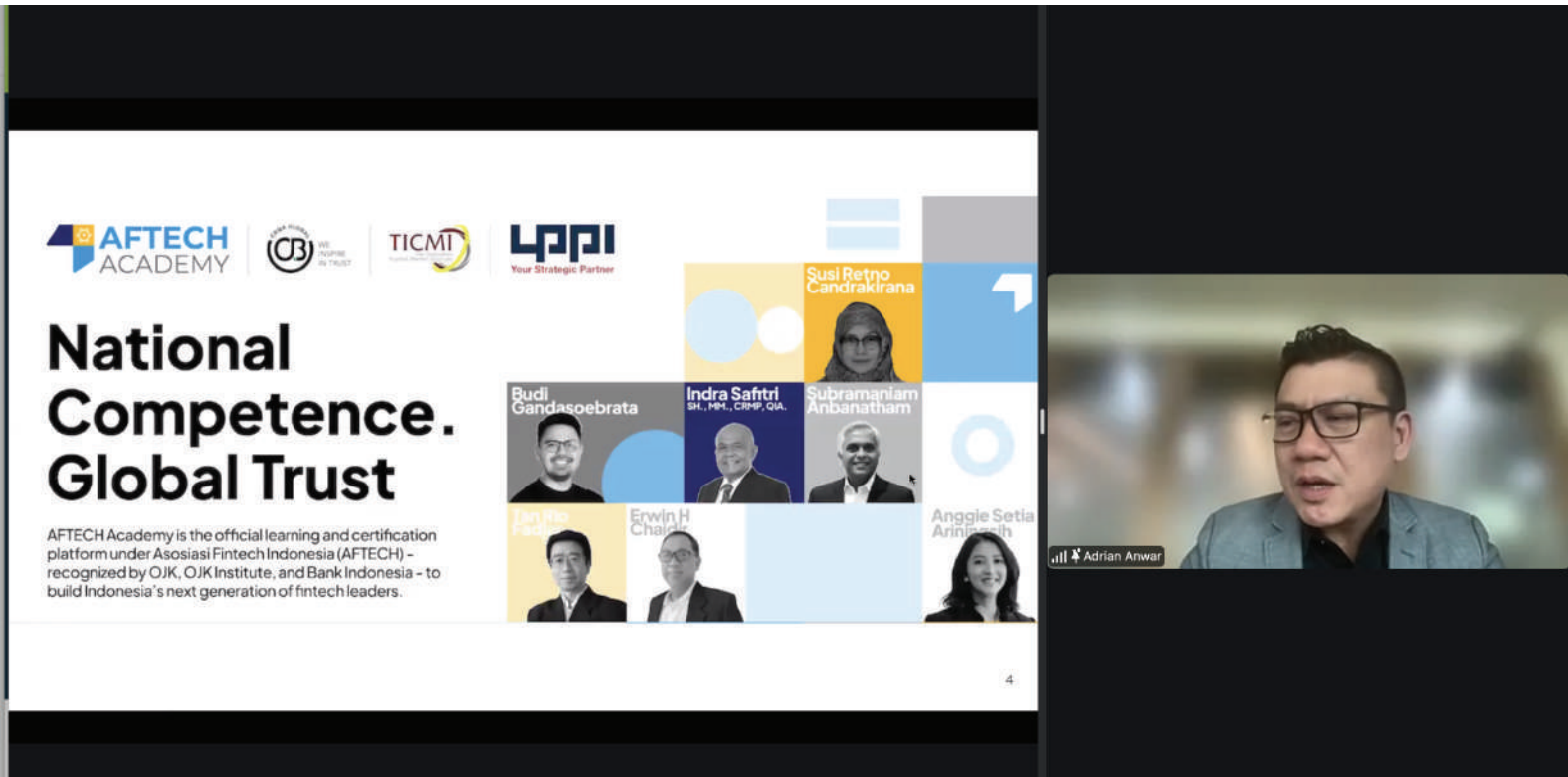


Forum tersebut mempertemukan berbagai unsur, mulai dari akademisi, regulator, industri, mahasiswa aktif, hingga alumni. Kehadiran beragam pemangku kepentingan ini menjadi bagian penting dari upaya pemutakhiran kurikulum agar tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan maupun dunia kerja.

Dalam diskusi, AFTECH menyampaikan perspektif praktisi mengenai kebutuhan dunia kerja terhadap lulusan yang memiliki kemampuan berpikir terstruktur, sistematis, dan aplikatif. Masukan ini mencerminkan pentingnya keterhubungan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan nyata di lapangan, khususnya dalam konteks perubahan yang terus berlangsung di berbagai sektor.

Selain itu, AFTECH juga menekankan pentingnya integritas akademik, etika riset, serta pemanfaatan kecerdasan artificial secara bertanggung jawab dalam pendidikan doctoral. Pandangan tersebut diharapkan dapat memperkaya proses pengembangan kurikulum, sehingga program doctoral tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga responsif terhadap perkembangan yang sedang berlangsung.

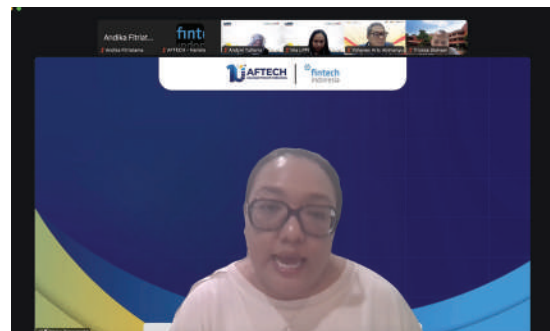
Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Luncurkan AFTECH Academy

Penguatan kompetensi menjadi salah satu agenda yang ditandai AFTECH melalui peluncuran AFTECH Academy dalam sebuah online event pada 15 Januari 2026. Kegiatan bertema “Get Your Business Complied and Your Talent Certified” ini diselenggarakan untuk memperkenalkan layanan training professional sekaligus menjangring partisipasi anggota AFTECH. Sebelumnya, AFTECH Academy telah diperkenalkan lebih awal pada BFN Fest, 11 Desember 2025, kepada para pemangku kepentingan.

Dalam kegiatan tersebut hadir Mercy Simorangkir selaku Executive Director AFTECH, Adrian Anwar selaku Principal Advisor AFTECH, dan Anwar Siregar selaku Director CBQA. Ketiganya memaparkan arah pengembangan AFTECH Academy sebagai bagian dari upaya penguatan kompetensi di industri keuangan digital.

Pembahasan utama dalam acara ini mencakup overview dan positioning AFTECH Academy sebagai Indonesia’s Fintech Competency Accelerator, pemaparan program pelatihan dan sertifikasi berbasis regulasi, global best practices, dan local industry practice, serta penawaran khusus program AFTECH Academy untuk periode Q1 2026. Layanan training professional di bawah AFTECH Academy sendiri diselenggarakan bersama pihak ketiga dan menjadi pathway sebelum peluncuran resmi LSP AFTECH.



Antusiasme peserta terlihat dari kehadiran lebih dari 70 peserta yang tidak hanya berasal dari anggota AFTECH, tetapi juga dari anggota asosiasi lain dan pelaku ekosistem keuangan digital lintas sektor. Peserta tersebut mencakup sektor perbankan, pasar modal atau sekuritas, lembaga keuangan, hingga institusi pendukung ekosistem digital. Partisipasi lintas asosiasi dan lintas sektor ini memperkuat posisi AFTECH Academy sebagai platform kolaboratif nasional dalam penguatan kompetensi, kepatuhan, dan kepercayaan terhadap ekosistem keuangan digital Indonesia.

AFTECH Perkuat Sinergi Anti-Scam melalui GASA Indonesia Chapter



Penguatan kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan scam menjadi tema utama dalam GASA Indonesia Chapter Meeting yang digelar pada 28 Januari 2026 di Kantor Meta, Jakarta. Sekretariat AFTECH hadir dalam forum ini melalui Direktur Layanan Eksternal & Internal AFTECH dan Senior Policy Associate. Dalam pertemuan tersebut, AFTECH berpartisipasi selaku Vice Chairman GASA Indonesia Chapter bersama perwakilan dari GASA Global, Meta, Mastercard, Visa, Dana, ASEAN Foundation, CSIS Indonesia, dan Tech for Good Institute.

Forum ini diposisikan sebagai ruang strategis lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi menghadapi meningkatnya kejahatan digital lintas platform dan lintas negara di Asia Tenggara. Ketua GASA Indonesia, Reski Damayanti, menegaskan kembali mandat GASA yang bertumpu pada empat pilar, yaitu intelligence sharing, networking, riset, dan inisiatif berbasis solusi. Fokus Indonesia saat ini diarahkan pada penguatan kolaborasi lintas sektor, agenda riset dan kebijakan, serta pengembangan solusi yang dapat diimplementasikan bersama.

Sebagai tuan rumah, Meta menekankan bahwa penanganan scam tidak dapat dilakukan secara sektoral. Pendekatan kemitraan publik-swasta yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi publik, dan penguatan kerja sama regional dinilai menjadi unsur penting dalam membangun respons yang lebih efektif. Dalam kesempatan yang sama, GASA Indonesia Chapter juga menyambut CSIS Indonesia, ASEAN Foundation, dan Visa sebagai anggota baru untuk memperkuat basis data, riset kebijakan, dan kolaborasi lintas negara.

Diskusi dalam forum ini juga menyoroti agenda kerja GASA Indonesia Chapter 2026 yang mencakup roadshow regional, riset dan advokasi kebijakan, edukasi publik, serta rencana national anti-scam event. Isu strategis yang mengemuka adalah mekanisme pelaporan scam di Indonesia yang masih terfragmentasi dan belum terintegrasi secara nasional. Keterlibatan AFTECH dalam forum ini menegaskan peran asosiasi sebagai mitra strategis dalam perlindungan konsumen dan penguatan kepercayaan terhadap layanan keuangan digital. Sebagai tindak lanjut, AFTECH akan memperkuat perannya melalui sinergi dengan program kerja DPH 2026, khususnya dalam kolaborasi lintas sektor, riset kebijakan anti-scam, serta program edukasi dan advokasi yang relevan.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Dukung Penguatan Strategi Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional



Arah kebijakan literasi dan inklusi keuangan nasional kembali menjadi perhatian AFTECH melalui kehadirannya dalam kegiatan Coffee Morning – Sosialisasi Strategi Program GENCARKAN Tahun 2026 dan Evaluasi Realisasi Program GENCARKAN Tahun 2025 yang diselenggarakan OJK pada 2 Februari 2026 secara hibrida. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Mohammad Ismail Riyadi, dengan paparan dari Cecep Setiawan selaku Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK. AFTECH menghadiri pertemuan secara luring melalui Wakil Sekretaris Jenderal I, sementara perwakilan Sekretariat mengikuti secara daring.

Dalam forum tersebut, OJK menegaskan bahwa kesinambungan program literasi dan inklusi keuangan tetap dijaga dengan GENCARKAN sebagai platform utama nasional. Program ini didorong untuk tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan menjadi bagian dari strategi bisnis industri. Ke depan, pendekatan kebijakan akan diarahkan pada financial health sebagai upaya mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pengelolaan keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

OJK juga menyampaikan capaian program literasi dan inklusi yang telah menjangkau 512 dari 514 kabupaten/kota sepanjang 2025 melalui kolaborasi dengan pelaku industri jasa keuangan. Meski demikian, produk keuangan syariah masih menghadapi kesenjangan antara literasi dan inklusi. Karena itu, strategi 2026 akan difokuskan pada pemerataan literasi sejak dini melalui integrasi kurikulum, penguatan program One PUJK One School, serta peningkatan peran pemerintah daerah. Pada sisi inklusi, pembentukan TPKAD dan pelaksanaan program KEJAR dinilai menunjukkan perkembangan, meskipun optimalisasi penggunaan produk keuangan masih perlu diperkuat.

Dalam diskusi, AFTECH menekankan pentingnya pendekatan literasi yang berbasis segmen, wilayah, dan tingkat pemahaman, disertai indikator keberhasilan yang lebih terukur. AFTECH juga menyatakan kesiapan untuk mendukung program GENCARKAN melalui jejaring komunitas dan perguruan tinggi lewat program INFINITY, serta melalui UMKM dan ekosistem keuangan digital lewat program FULUS. Sebagai tindak lanjut, AFTECH akan mempersiapkan partisipasi aktif dalam pertemuan lanjutan dengan regulator dan pelaku fintech, menyusun posisi asosiasi beserta rekomendasi program, serta mendorong keterlibatan anggota dalam agenda edukasi termasuk implementasi One PUJK, One School.

AFTECH Paparkan Hasil Studi Kolaborasi Bank dan P2P Lending kepada OJK



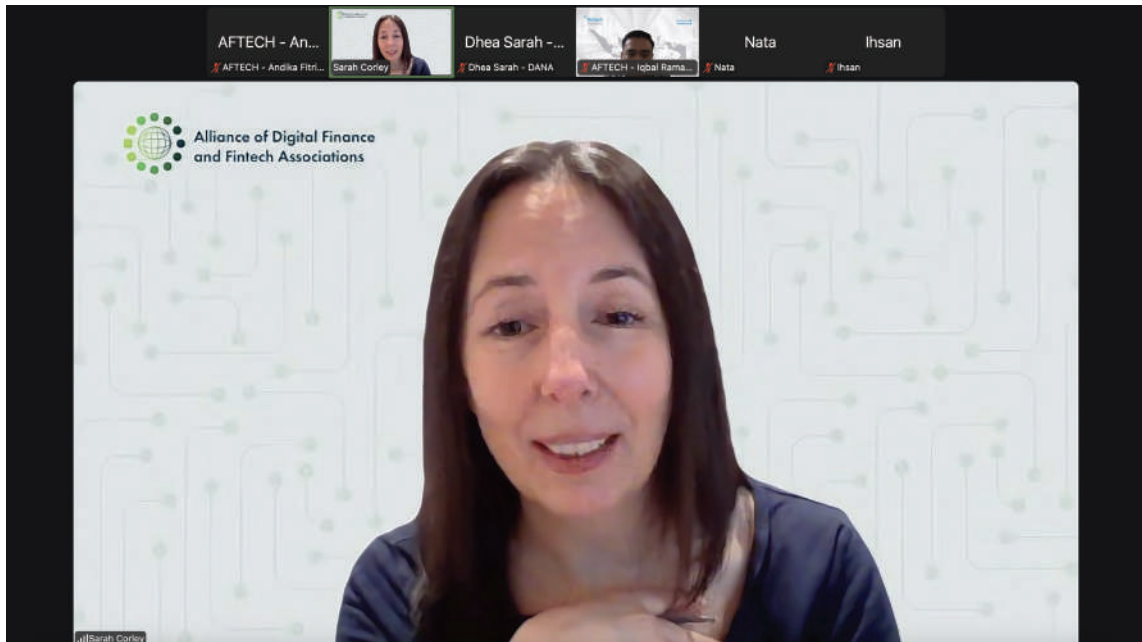
Kolaborasi perbankan dan LPBBTI menjadi pokok pembahasan dalam audiensi AFTECH bersama Mandala Consulting dengan OJK PVML yang digelar secara daring pada 5 Februari 2026. Pertemuan ini bertujuan memaparkan hasil studi kolaborasi bank dan peer-to-peer lending sekaligus memperoleh arahan regulator untuk memperkuat perspektif pengawasan dan pengembangan industri.

Audiensi dihadiri Direktur dan Deputi Direktur Pengembangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura OJK beserta tim PVML. Dari AFTECH hadir jajaran Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal I, tim Sekretariat, serta perwakilan anggota Departemen LPBBTI AFTECH, sementara Mandala Consulting hadir sebagai mitra penyusun studi.

Dalam sambutan pembuka, OJK mengapresiasi inisiatif studi berbasis data tersebut dan menekankan pentingnya masukan industri, khususnya terkait LPBBTI, BNPL, dan dukungannya terhadap pembiayaan UMKM, terutama pada segmen unbanked dan underbanked. OJK juga menyoroti dominasi lender institusional, pentingnya penguatan model bisnis dan mitigasi risiko, serta kebutuhan akan sinergi lintas sektor keuangan, termasuk perbankan dan asuransi. AFTECH menegaskan bahwa kolaborasi bank dan LPBBTI bersifat komplementer, bukan substitutif. Penyelenggara LPBBTI diposisikan sebagai jembatan awal akses pembiayaan bagi segmen yang belum terlayani, sementara perbankan tetap menjadi pilar utama sistem pembiayaan nasional. AFTECH juga menyampaikan perkembangan AFTECH Layanan Pendanaan Digital sebagai wadah penguatan tata kelola, praktik bertanggung jawab, dan fungsi self-regulatory industri.

Paparan Mandala Consulting menyoroti bahwa rasio kredit terhadap PDB di Indonesia masih cenderung stagnan dalam satu dekade terakhir dan berada di bawah tingkat optimal bagi negara berkembang. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa kolaborasi bank dan LPBBTI berperan signifikan dalam memperluas akses kredit, khususnya bagi UMKM dan segmen underbanked, sementara perbankan melihat kemitraan ini sebagai strategi diversifikasi penyaluran kredit. White paper yang disusun juga membahas motivasi perbankan dalam mendukung target inklusi keuangan dan ESG, peran LPBBTI dalam menjangkau segmen yang belum terlayani secara efisien, serta kebutuhan penguatan mitigasi risiko, pemanfaatan asuransi kredit, dan penyelarasan kerangka pengawasan ke depan. Sebagai tindak lanjut, AFTECH dan Mandala Consulting akan meluncurkan white paper pada 11 Februari 2026 serta melanjutkan dialog dengan OJK PVML untuk mendorong percepatan penyaluran kredit ke sektor produktif.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

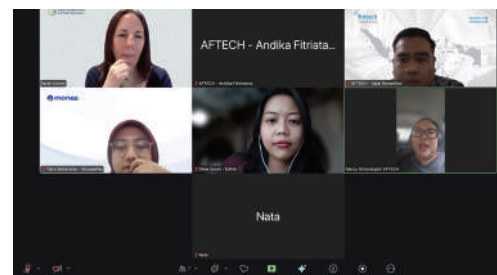
AFTECH Ikut Diskusi soal *Instant Payment Systems*

AFTECH berpartisipasi dalam Focus Group Discussion mengenai Instant Payment Systems yang diselenggarakan Alliance for Digital Finance pada 9 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari studi lintas negara yang melihat bagaimana fintech dan pelaku non-bank berperan dalam sistem pembayaran instan nasional. Forum ini penting karena pembahasan mengenai sistem pembayaran kini tidak lagi terbatas pada infrastruktur, tetapi juga menyangkut akses, peran pelaku, dan desain kebijakan yang akan menentukan arah ekosistem ke depan.

Dalam diskusi tersebut, hadir perwakilan dari penyelenggara jasa pembayaran non-bank seperti ShopeePay, DANA, dan OVO. Kehadiran para pelaku ini memberi gambaran langsung mengenai pengalaman industri dalam beroperasi di sistem pembayaran digital yang terus berkembang. Dari pembahasan yang berlangsung, muncul pandangan bahwa Indonesia pada dasarnya sudah memiliki fondasi yang cukup kuat untuk pengembangan sistem pembayaran instan, terutama dari sisi interoperabilitas dan konektivitas lintas penyelenggara.

Meski begitu, forum ini juga menyoroti bahwa fondasi teknis yang kuat belum cukup jika tidak dibarengi tata kelola yang tepat. Salah satu perhatian utama adalah bagaimana memastikan pelaku non-bank tetap memiliki ruang partisipasi yang jelas dan proporsional. Dalam konteks ini, pengaturan yang terlalu sempit berpotensi menghambat inovasi, sementara pengaturan yang tidak seimbang juga bisa menimbulkan ketidakjelasan peran di lapangan.

Isu lain yang mengemuka adalah keberlanjutan model bisnis, struktur biaya, serta akses partisipasi dalam kerangka sistem pembayaran nasional. Bagi pelaku industri, hal-hal ini sangat menentukan apakah sistem yang dibangun benar-benar mendorong inklusi dan efisiensi, atau justru menciptakan hambatan baru. Karena itu, diskusi tidak hanya berhenti pada aspek kebijakan makro, tetapi juga menyentuh hal-hal yang sangat praktis bagi pelaku.



Bagi AFTECH, forum seperti ini menjadi sumber masukan yang penting untuk memantau perkembangan sistem pembayaran dan posisi fintech di dalamnya. Hasil diskusi ini juga relevan untuk membantu AFTECH mengidentifikasi isu-isu yang perlu terus diperhatikan, terutama terkait partisipasi non-bank, desain tata kelola, dan keberlanjutan ekosistem pembayaran digital nasional.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Dorong Literasi dan Perlindungan Konsumen di Forum Anak Muda ASEAN



AFTECH turut hadir dalam Southeast Asia Youth Forum on Consumer Protection yang digelar pada 9 Februari 2026 di Jakarta. Forum ini diselenggarakan oleh CIREs FISIP Universitas Indonesia bersama GIZ melalui program Consumer Protection in ASEAN (PROTECT II). Fokus utamanya adalah membangun kesadaran konsumen muda di kawasan ASEAN agar lebih siap menghadapi risiko di era digital, terutama dalam penggunaan layanan keuangan yang semakin mudah diakses.

AFTECH hadir melalui Indonesia Fintech Youth Community (INFINITY) yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang Regulatory & Compliance, Marshall Pribadi. Dalam forum tersebut, salah satu isu utama yang dibahas adalah masih lebarnya jarak antara inklusi dan literasi keuangan. Banyak masyarakat, khususnya generasi muda, sudah lebih cepat masuk ke ekosistem digital, tetapi belum seluruhnya memahami cara kerja produk, risikonya, maupun langkah-langkah perlindungan yang perlu mereka lakukan sebagai konsumen.

Dari sisi regulator, OJK menyoroti kondisi *access without understanding*, yaitu situasi ketika akses terhadap layanan keuangan tumbuh lebih cepat daripada pemahaman konsumen. Situasi ini menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap penipuan, penyalahgunaan data, atau keputusan finansial yang tidak disadari risikonya. Tantangan ini menjadi semakin kompleks karena produk keuangan digital yang dihadapi generasi muda juga semakin beragam.

AFTECH menambahkan bahwa generasi muda saat ini berhadapan dengan produk seperti BNPL, aset kripto, dan berbagai bentuk penawaran finansial yang menyebar cepat melalui media sosial. Dalam situasi seperti itu, edukasi formal saja sering kali tidak cukup. Karena itu, pendekatan berbasis komunitas dan *peer-to-peer education* dinilai lebih efektif karena menggunakan bahasa, medium, dan konteks yang lebih dekat dengan keseharian anak

Keikutsertaan AFTECH dalam forum ini menunjukkan bahwa agenda perlindungan konsumen tidak bisa dipisahkan dari penguatan literasi. Bagi AFTECH, forum ini juga membuka peluang untuk memperkuat kerja sama dengan regulator, akademisi, dan komunitas regional dalam membangun pendekatan literasi yang lebih relevan bagi kelompok

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Perkuat Agenda Literasi lewat Peluncuran MOJANG



AFTECH bersama Easycash dan IARFC Indonesia meluncurkan Modul Bijak Keuangan atau MOJANG pada 10 Februari 2026 di Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat literasi keuangan, khususnya bagi generasi muda yang kini semakin aktif menggunakan layanan keuangan digital dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu latar belakang utama peluncuran MOJANG adalah masih adanya kesenjangan antara akses dan pemahaman. Banyak anak muda sudah akrab dengan aplikasi keuangan, pinjaman digital, hingga berbagai instrumen pembayaran dan investasi. Namun dalam praktiknya, tidak semua memahami pengelolaan keuangan dasar, risiko penggunaan utang, pentingnya reputasi kredit, maupun cara mengambil keputusan finansial yang sehat.



Dalam diskusi yang berlangsung, para pembicara menekankan bahwa literasi keuangan perlu disampaikan dengan pendekatan yang lebih praktis dan sesuai dengan karakter generasi muda. Materi yang terlalu umum atau terlalu normatif sering kali tidak cukup efektif. Karena itu, dibutuhkan model pembelajaran yang lebih aplikatif, dekat dengan keseharian, dan bisa langsung dihubungkan dengan keputusan-keputusan yang benar-benar dihadapi oleh pengguna muda.

MOJANG dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Modul ini membahas pengelolaan pendapatan, utang produktif dan konsumtif, tabungan, investasi, hingga pengelolaan skor kredit. Selain itu, pendekatannya juga dibuat lebih interaktif, termasuk melalui elemen seperti game literasi finansial, agar materi tidak terasa kaku dan lebih mudah diterima.

Bagi AFTECH, peluncuran MOJANG memperlihatkan bahwa literasi keuangan perlu terus dibangun sebagai fondasi perlindungan konsumen. Dalam jangka panjang, penguatan industri tidak hanya bergantung pada kualitas produk dan regulasi, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan digital secara lebih bijak.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Jajaki Peluang Kerja Sama dengan Invest Hong Kong



AFTECH berkesempatan untuk berdiskusi dengan Invest Hong Kong pada 11 Februari 2026 di Jakarta dalam membahas perkembangan ekosistem fintech Hong Kong dan kemungkinan kerja sama dengan komunitas fintech Indonesia. Pertemuan ini juga menjadi kesempatan untuk melihat lebih dekat bagaimana Hong Kong membangun posisi sebagai salah satu pusat keuangan digital dan aset digital di kawasan.

Dari pemaparan yang disampaikan, Invest Hong Kong menekankan perannya sebagai penghubung global bagi perusahaan teknologi yang ingin mengakses investasi internasional dan pasar modal. Pemerintah setempat juga tengah mendorong agenda Fintech 2030, yang mencakup penguatan infrastruktur pembayaran generasi baru, pengembangan AI, ketahanan kuantum, serta tokenisasi keuangan. Ini menunjukkan bahwa arah kebijakan mereka tidak hanya fokus pada penguatan pasar yang sudah ada, tetapi juga pada teknologi yang sedang berkembang.

Regulasi juga menjadi bagian penting dari pembahasan. Hong Kong saat ini terus mengembangkan kerangka untuk aset digital dan stablecoin, sekaligus memperkuat pengawasan pasar agar tetap aman dan kredibel. Bagi AFTECH, perkembangan ini menarik karena memberi gambaran tentang bagaimana suatu yurisdiksi mencoba menyeimbangkan dorongan inovasi dengan kebutuhan kepastian regulasi dan perlindungan investor.

Pertemuan ini juga membuka kemungkinan kerja sama yang lebih konkret. Salah satu yang dibahas adalah peluang partisipasi delegasi fintech Indonesia dalam Hong Kong Fintech Week 2026. Selain itu, ada pula wacana dukungan promosi bagi startup Indonesia dan kemungkinan fasilitasi booth bagi pelaku usaha yang ingin memperluas eksposur mereka di pasar Asia.

Bagi AFTECH, pertemuan ini penting bukan hanya karena membuka akses jejaring internasional, tetapi juga karena memberi peluang bagi anggota untuk melihat perkembangan pasar lain secara lebih langsung. Ini sejalan dengan upaya AFTECH untuk memperkuat posisi ekosistem fintech Indonesia, baik di tingkat nasional maupun regional.

Whitepaper AFTECH dan Mandala Consulting Dorong Kolaborasi Bank dan P2P Lending

Peluncuran *White Paper*: Mendorong Perluasan Akses Kredit Melalui Kolaborasi Bertanggung Jawab antara Bank dan Platform P2P Lending

The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place, 11 February 2026



AFTECH baru saja meluncurkan whitepaper tentang kolaborasi perbankan dengan P2P lending pada 11 Februari 2026 di Jakarta. Whitepaper ini disusun sebagai referensi untuk melihat bagaimana kolaborasi antara kedua sektor dapat diperkuat secara lebih terstruktur, khususnya dalam mendukung pembiayaan UMKM.

Kajian ini berangkat dari satu situasi yang sudah lama menjadi perhatian, yaitu masih terbatasnya akses pembiayaan formal bagi banyak UMKM, meskipun digitalisasi di sektor keuangan berkembang cukup cepat. Whitepaper tersebut disusun melalui studi literatur, wawancara dengan praktisi, dan FGD dengan berbagai jenis bank. Pendekatan ini memberi gambaran yang lebih menyeluruh mengenai tantangan, peluang, dan syarat utama agar kolaborasi bisa berjalan sehat.

Dalam peluncurannya, sejumlah ahli menekankan bahwa kerja sama antara bank dan fintech lending tidak bisa hanya dilihat sebagai hubungan bisnis biasa. Kolaborasi seperti ini harus dibangun di atas standar tata kelola yang kuat, integrasi data yang baik, manajemen risiko yang memadai, dan pembagian peran yang jelas. Tanpa itu, potensi kerja sama yang besar bisa justru menimbulkan persoalan baru dari sisi operasional maupun perlindungan konsumen.



AFTECH juga menegaskan bahwa whitepaper ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen berhenti di meja diskusi. Justru sebaliknya, hasil kajian ini diharapkan menjadi dasar untuk langkah lanjutan yang lebih implementatif, termasuk penyusunan panduan praktik baik dan forum diskusi lanjutan antara pelaku perbankan dan penyelenggara P2P lending.

Bagi AFTECH, isu ini penting karena pembiayaan UMKM masih menjadi salah satu titik temu paling nyata antara inovasi keuangan digital dan kebutuhan sektor riil. Karena itu, penguatan kolaborasi bank dan fintech lending dilihat bukan hanya sebagai peluang industri, tetapi juga sebagai salah satu jalan untuk memperluas dampak ekonomi dari transformasi digital di sektor keuangan.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH dan CIMB Niaga Bahas Peluang Sinergi



AFTECH melakukan office visit ke Bank CIMB Niaga pada 11 Februari 2026 di Jakarta untuk membahas peluang sinergi yang lebih luas antara institusi perbankan dan ekosistem fintech. Pertemuan ini menjadi ruang awal untuk melihat area kerja sama yang dapat dikembangkan, baik dari sisi bisnis maupun dari sisi penguatan konektivitas dalam ekosistem keuangan digital.

Dalam pembahasannya, CIMB Niaga menyampaikan keinginan untuk terhubung lebih aktif dengan AFTECH dan para anggotanya. Ketertarikan ini bukan hanya pada level partisipasi asosiasi, tetapi juga dalam diskusi isu-isu strategis seperti manajemen risiko, fraud, pengembangan teknologi, dan keterhubungan dengan pemangku kepentingan lain di sektor keuangan.

Dari sisi bisnis, CIMB Niaga juga menjelaskan beberapa fokus utamanya, termasuk pada area treasury dan API. Beberapa bidang yang disebut antara lain foreign currency API, investment/bond API, dan hedging. Penjelasan ini menunjukkan bahwa perbankan juga terus melihat pentingnya integrasi teknologi dan konektivitas sistem sebagai bagian dari pengembangan layanan mereka ke depan.

Meski demikian, tantangan implementasi tetap ada. CIMB Niaga mengakui bahwa penerapan API di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala dari sisi regulasi dan prosedural. Hal ini membuat ruang diskusi dengan asosiasi seperti AFTECH menjadi penting, karena ada kebutuhan untuk menjembatani perspektif industri, lembaga keuangan, dan arah kebijakan yang berkembang.

Pertemuan ini juga membahas usulan kerja sama yang lebih operasional, termasuk skema referral bagi anggota AFTECH untuk pembukaan rekening di CIMB Niaga. Walaupun masih memerlukan pembahasan internal lebih lanjut, pembicaraan ini menunjukkan bahwa hubungan antara asosiasi dan bank dapat bergerak dari sekadar jejaring menjadi bentuk kerja sama yang lebih konkret.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

Konsolidasi Agenda *Insurtech* 2026



AFTECH menggelar AFTECH Insurtech Kick-Off Meet-Up 2026 pada 11 Februari 2026 di Jakarta sebagai forum awal tahun bagi anggota klaster insurtech. Kegiatan ini ditujukan untuk memetakan isu-isu utama yang dihadapi industri dan menyelaraskan prioritas sebelum dibawa ke ruang advokasi yang lebih formal.

Salah satu isu yang paling banyak dibahas adalah pengenaan Bea Meterai Rp10.000 terhadap polis individu. Bagi pelaku industri, kebijakan ini dipandang kurang proporsional untuk produk micro insurance dan asuransi digital dengan premi rendah. Jika diterapkan tanpa penyesuaian atau pendekatan yang lebih tepat, biaya tambahan seperti ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada keterjangkauan produk bagi masyarakat.



Selain itu, perhatian juga tertuju pada Program Penjaminan Polis yang direncanakan mulai berlaku pada Januari 2027. Peserta diskusi menyampaikan kekhawatiran bahwa tambahan biaya dari skema tersebut bisa memberi tekanan pada produk-produk mikro dan embedded insurance. Karena itu, muncul kebutuhan untuk melakukan simulasi dampak biaya dan menyusun argumentasi yang lebih kuat agar kebijakan tidak justru menghambat perluasan inklusi asuransi.

Forum ini juga menyinggung kebutuhan kejelasan posisi antara Layanan Pialang Asuransi Digital dan Layanan Asuransi Digital. Bagi industri, kejelasan ini penting agar ada level playing field yang sehat dan agar pelaku usaha dapat bergerak dengan kepastian yang lebih baik. Ketidakjelasan kategori atau ruang lingkup layanan dapat berdampak pada model bisnis dan arah pengembangan usaha.

Bagi AFTECH, forum ini menjadi ruang konsolidasi yang penting agar isu-isu insurtech tidak dibahas secara terpisah-pisah. Dengan menyatukan perspektif anggota lebih awal, asosiasi dapat membawa masukan yang lebih terstruktur, berbasis data, dan relevan saat berhadapan dengan regulator maupun pemangku kepentingan lain.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Jajaki Kolaborasi Governance dan Risk Innovation bersama 1835i



AFTECH mengadakan pertemuan eksploratif dengan 1835i, innovation arm dari ANZ Bank, pada 19 Februari 2026 untuk menjajaki kemungkinan kerja sama di bidang inovasi, tata kelola, dan penguatan kerangka risiko. Walaupun masih berada pada tahap awal, pertemuan ini menarik karena memperlihatkan bahwa minat terhadap ekosistem fintech Indonesia tidak hanya datang dari sisi investasi atau ekspansi pasar, tetapi juga dari pendekatan yang lebih menekankan governance dan risk assurance.

Dari pihak 1835i, Indonesia dilihat sebagai salah satu kawasan dengan pertumbuhan signifikan, terutama di sektor fintech dan transformasi digital jasa keuangan. Namun yang menjadi pembeda adalah fokus mereka yang tidak berhenti pada venture incubation. Mereka justru tertarik pada pengembangan model operasional yang menggabungkan inovasi dengan regulatory alignment, risk visibility, dan fondasi tata kelola yang lebih kuat. Pendekatan ini membuat percakapan dengan AFTECH menjadi relevan dan strategis.

AFTECH dalam pertemuan ini menekankan bahwa ekosistem ITSK di Indonesia sudah semakin kompleks, dengan lebih dari 25 model bisnis yang berkembang. Seiring dengan itu, kebutuhan industri juga mulai bergeser. Jika sebelumnya perhatian besar banyak tertuju pada pengembangan produk dan penetrasi pasar, saat ini kebutuhan yang semakin terasa justru ada pada shared regulatory infrastructure, pelaporan yang lebih terstruktur, dan kerangka akuntabilitas yang lebih jelas.

Hal ini penting karena supervisory framework di Indonesia masih sangat bertumpu pada structured reporting, governance attestations, dan board accountability frameworks. Dalam konteks ini, desain kemitraan, inovasi, atau model percontohan tidak bisa dibangun semata dari sisi teknologi atau bisnis, tetapi harus mempertimbangkan ekspektasi regulator dan kesiapan tata kelola sejak awal. Itulah sebabnya pembahasan dengan mitra seperti 1835i menjadi lebih menarik ketika ditempatkan dalam kerangka pembangunan fondasi industri, bukan hanya pencarian peluang kolaborasi jangka pendek.

(Bersambung ke halaman berikutnya)

Meskipun belum mengarah pada bentuk kerja sama final, pertemuan ini membuka ruang untuk melihat kemungkinan scoped pilot atau design partnership yang lebih spesifik di masa depan. Bagi AFTECH, percakapan seperti ini menunjukkan bahwa penguatan industri fintech ke depan akan semakin membutuhkan mitra yang tidak hanya memahami inovasi, tetapi juga pentingnya governance dan keterlihatan risiko dalam ekosistem yang makin matang.



Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Soroti Peran PIDI dalam Memperkuat Ekosistem Inovasi Digital



Peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada 23 Februari 2026 menjadi sinyal bahwa penguatan ekonomi dan keuangan digital nasional mulai diarahkan melalui kerja sama yang semakin terintegrasi. Bagi AFTECH, inisiatif ini penting bukan hanya karena menghadirkan ruang baru bagi inovasi, tetapi juga karena menunjukkan bahwa regulator semakin serius membangun ekosistem digital yang kolaboratif dan berkelanjutan.

Kehadiran AFTECH dalam peluncuran tersebut mencerminkan peran asosiasi yang tidak hanya mengikuti perkembangan industri, tetapi juga ikut berada di dalam proses pembentukan fondasinya. Dalam konteks ini, PIDI terlihat bukan sekadar sebagai ruang program atau kegiatan, melainkan sebagai titik temu antara regulator, industri, akademisi, investor, dan talenta digital.

Yang menarik, pendekatan PIDI tidak berhenti pada promosi inovasi. Platform ini dirancang untuk menghubungkan pengembangan talenta, kebutuhan industri, dan arah kebijakan dalam satu kerangka yang lebih utuh. Artinya, inovasi ke depan akan semakin dinilai bukan hanya dari kebaruan ide, tetapi juga dari kemampuannya menjawab kebutuhan nyata dan tumbuh dalam ekosistem yang siap mendukungnya.

Bagi industri fintech, pendekatan seperti ini membuka ruang yang cukup strategis. Tantangan ekosistem selama ini tidak hanya terletak pada lahirnya solusi baru, tetapi juga pada ketersediaan SDM, kualitas kolaborasi, dan kemampuan menjembatani inovasi dengan kebutuhan pasar. Dalam titik itu, PIDI memberi harapan pada model pengembangan yang lebih terarah.

Dari peluncuran ini terlihat bahwa penguatan ekonomi digital nasional semakin bergerak ke arah pembangunan ekosistem yang tidak hanya inovatif, tetapi juga tertata. Karena itu, keterlibatan AFTECH dalam PIDI menjadi relevan sebagai bagian dari upaya menjaga agar transformasi digital tetap berjalan seimbang antara inovasi, stabilitas, dan perlindungan konsumen.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Dorong Peran PKA dalam Perluasan Pembiayaan Perumahan Sektor Informal



Rapat koordinasi yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada 27 Februari 2026 menyoroti tantangan mendasar dalam pembiayaan perumahan nasional, yaitu masih terbatasnya akses sektor informal terhadap skema pembiayaan formal. Dalam pembahasan ini, AFTECH melihat bahwa pelaku kredit alternatif mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari solusi untuk menjembatani keterbatasan data yang selama ini menjadi hambatan utama.

Diskusi menunjukkan bahwa pembiayaan perumahan bersubsidi masih didominasi pekerja formal, sementara sebagian besar angkatan kerja Indonesia justru berada di sektor informal. Ketergantungan perbankan pada bukti penghasilan formal seperti slip gaji dan rekening koran membuat banyak calon debitur potensial tetap sulit dijangkau, meskipun secara ekonomi mereka sebenarnya aktif dan produktif.

Dalam konteks itulah PKA dipandang punya peran yang semakin relevan. Pemanfaatan data alternatif berbasis persetujuan pengguna memberi peluang untuk meningkatkan visibilitas risiko terhadap kelompok thin file, unbanked, dan underserved. Yang ditekankan, PKA bukan pengganti credit scoring bank, melainkan pelengkap yang membantu memperluas kemampuan sistem membaca profil calon debitur.

Namun forum juga menegaskan bahwa pemanfaatan PKA dalam skema KPR subsidi tidak bisa didorong hanya atas dasar optimisme inovasi. Seluruh pihak menekankan perlunya proof of concept dan back-testing untuk memastikan bahwa model yang dikembangkan benar-benar punya korelasi dengan performa aktual portofolio pembiayaan. Pendekatan ini penting agar inovasi tetap dibangun di atas dasar yang terukur.

Dari pembahasan ini terlihat bahwa perluasan pembiayaan bagi sektor informal membutuhkan kombinasi antara inovasi data, kehati-hatian risiko, dan dukungan kebijakan yang lintas sektor. Karena itu, peran AFTECH dalam memfasilitasi koordinasi lintas PKA menjadi relevan sebagai bagian dari upaya membangun model inklusi pembiayaan perumahan yang lebih adaptif terhadap realitas tenaga kerja Indonesia.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Perkuat Konektivitas Lintas Klaster melalui Forum Informal Antaranggota



Kegiatan buka puasa bersama yang mempertemukan Klaster Perbankan dan Klaster Infrastruktur Teknologi AFTECH pada 2 Maret 2026 menunjukkan bahwa penguatan ekosistem tidak selalu harus dimulai dari forum formal. Dalam banyak kasus, hubungan yang kuat justru tumbuh dari ruang interaksi yang lebih cair, yang memungkinkan anggota saling mengenal, membangun kepercayaan, dan membuka jalur komunikasi yang lebih natural.

Meskipun forum ini belum diarahkan pada pembahasan kebijakan atau agenda teknis tertentu, nilainya tetap terasa penting. Ketika dua klaster yang memiliki keterkaitan erat dalam pengembangan layanan keuangan digital dipertemukan dalam suasana yang lebih informal, ruang pertukaran pandangan menjadi lebih terbuka. Ini menjadi fondasi awal yang tidak selalu terlihat langsung hasilnya, tetapi sering kali menentukan kualitas kolaborasi di tahap berikutnya.

Bagi AFTECH, pendekatan seperti ini relevan karena ekosistem fintech tidak hanya dibangun melalui agenda program dan struktur organisasi, tetapi juga lewat kualitas relasi antarpelaku di dalamnya. Dalam konteks industri yang semakin kompleks, komunikasi yang baik antaranggota akan menjadi modal penting untuk mendorong kolaborasi yang lebih substansial, khususnya antara sektor perbankan dan infrastruktur teknologi yang saling berkaitan erat.

Forum ini juga memperlihatkan adanya keterbukaan dari anggota untuk terlibat dalam interaksi lintas klaster. Ini menjadi sinyal positif bahwa ruang engagement yang lebih fleksibel tetap dibutuhkan di samping forum-forum resmi yang berorientasi pada kebijakan dan advokasi.

Dari kegiatan ini terlihat bahwa penguatan asosiasi tidak hanya dibangun melalui keputusan dan program kerja, tetapi juga melalui kepercayaan yang tumbuh antaranggotanya. Dalam konteks itu, forum informal seperti ini menjadi relevan sebagai bagian dari penguatan fondasi ekosistem yang lebih solid.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

Aksi KLIK Dorong Inklusi Keuangan yang Lebih Bermakna bagi Kesejahteraan



Penyelenggaraan Aksi KLIK pada 6 Maret 2026 memperlihatkan bahwa agenda inklusi keuangan nasional mulai bergerak ke tahap yang lebih matang. Fokusnya tidak lagi hanya pada perluasan akses, tetapi juga pada sejauh mana akses tersebut benar-benar memberi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Salah satu pesan penting yang mengemuka dalam kegiatan ini adalah masih adanya jarak antara tingkat inklusi dan tingkat literasi keuangan. Akses terhadap layanan keuangan memang semakin luas, tetapi pemahaman masyarakat terhadap penggunaan produk dan layanan keuangan yang sehat belum selalu tumbuh dalam kecepatan yang sama. Dalam konteks ini, inklusi yang hanya bersifat formal belum cukup.

Pembahasan tentang financial wellbeing menjadi relevan karena menunjukkan perubahan cara pandang dalam agenda literasi dan inklusi keuangan. Masyarakat tidak hanya didorong untuk memiliki akses pada rekening, pembiayaan, atau sistem pembayaran digital, tetapi juga untuk mampu mengelola keuangannya secara sehat, membuat keputusan yang tepat, dan membangun ketahanan finansial dalam jangka panjang.

Bagi UMKM, pendekatan ini juga punya arti penting. Akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, dan perluasan pasar tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Program inklusi akan jauh lebih bermakna bila mampu membantu pelaku usaha berkembang secara nyata, bukan hanya tercatat sebagai penerima akses keuangan.

Dari kegiatan ini terlihat bahwa penguatan inklusi keuangan ke depan akan semakin bergantung pada pendekatan yang lebih utuh, yang menghubungkan akses, literasi, perlindungan, dan kesejahteraan. Dalam konteks itu, keterlibatan AFTECH menjadi relevan sebagai bagian dari dorongan agar transformasi keuangan digital benar-benar memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

Kick-off Infinity Accelerator Buka Ruang Kolaborasi Baru antara Startup dan Industri Fintech



Kebutuhan untuk memperkuat jembatan antara inovasi teknologi, kebutuhan industri, dan pengembangan startup semakin penting dalam ekosistem digital yang berkembang cepat. Dalam konteks itu, AFTECH menghadiri pertemuan kick-off program Infinity Accelerator pada 31 Maret 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan ekosistem fintech, inovasi teknologi finansial, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Pertemuan ini digunakan untuk memperkenalkan latar belakang program, tujuan pelaksanaan, ruang lingkup, target startup peserta, serta tahapan akselerator yang akan dijalankan. Infinity Accelerator dirancang sebagai platform untuk mendukung pengembangan startup dan inovasi teknologi melalui kolaborasi antara startup, industri, mentor, dan berbagai pihak dalam ekosistem digital. Bagi AFTECH, keterlibatan dalam tahap awal program ini memberi gambaran mengenai peluang yang dapat dibuka antara pelaku startup dan anggota industri fintech yang lebih mapan.

Dalam perkembangan ekosistem saat ini, program akselerasi seperti ini menjadi relevan karena kebutuhan inovasi tidak selalu dapat dijawab dari dalam organisasi yang sudah mapan. Sering kali, pembaruan justru lahir dari ruang kolaborasi yang mempertemukan kebutuhan industri dengan kelincahan startup dalam mengembangkan solusi. Di titik ini, accelerator tidak hanya berfungsi sebagai wadah pembinaan startup, tetapi juga sebagai ruang pencocokan kebutuhan, pengujian use case, dan pengembangan model kerja sama yang lebih konkret.

Bagi AFTECH, potensi kolaborasi yang muncul dari program ini cukup luas, mulai dari keterlibatan anggota sebagai mentor, partner industri, hingga potential user bagi solusi yang dikembangkan peserta. Kemungkinan pengembangan pilot project dan kerja sama bisnis juga membuka ruang yang lebih nyata bagi integrasi inovasi ke dalam kebutuhan industri. Dalam konteks yang lebih luas, langkah seperti ini membantu memperkuat ekosistem fintech Indonesia bukan hanya dari sisi pertumbuhan startup, tetapi juga dari sisi kemampuan ekosistem untuk menciptakan jalur kolaborasi yang lebih terstruktur dan lebih berkelanjutan.



10 Tahun AFTECH: Mendorong Inovasi, Menjaga Kepercayaan, dan Menata Masa Depan Industri Fintech Indonesia

AFTECH menandai satu dekade perjalanannya dalam perayaan HUT ke-10 yang digelar pada 10 Februari 2026 di Bimasena, The Dharmawangsa, Jakarta. Perayaan ini tidak hanya menjadi penanda usia organisasi, tetapi juga menjadi titik konsolidasi bagi pelaku industri, regulator, dan pemangku kepentingan untuk melihat kembali peran fintech dalam perekonomian nasional dan arah pengembangannya ke depan.

Sejak didirikan pada 2016 oleh enam founder, AFTECH dibentuk sebagai asosiasi payung yang menaungi beragam model bisnis fintech dan menjadi penghubung antara industri, regulator, dan masyarakat. Dalam perjalanannya, AFTECH juga mengambil peran sebagai asosiasi resmi penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang ditunjuk oleh OJK. Posisi ini membuat AFTECH tidak hanya berfungsi sebagai rumah bersama bagi industri, tetapi juga sebagai mitra dalam menjaga keseimbangan antara inovasi, tata kelola, dan perlindungan konsumen.

1 Dari Pertumbuhan ke Penguatan Kualitas



Tema HUT ke-10, “Mendorong Inovasi, Menjaga Kepercayaan, dan Menata Masa Depan Industri Fintech Indonesia,” mencerminkan fase baru yang sedang dihadapi industri. Setelah bertahun-tahun bertumbuh cepat, fintech kini dituntut untuk membuktikan kualitas tata kelola, keamanan ekosistem, dan dampaknya terhadap masyarakat. Fokus industri tidak lagi hanya pada ekspansi, tetapi juga pada bagaimana pertumbuhan itu dijaga agar tetap sehat, bertanggung jawab, dan relevan dengan kebutuhan ekonomi nasional.

Arah ini juga terlihat dari hasil Annual Members Survey AFTECH 2024–2025 yang menunjukkan bahwa tantangan industri masih cukup besar. Pengguna fintech masih terkonsentrasi di Jabodetabek, akses masyarakat berpenghasilan rendah belum merata, risiko phishing dan fraud eksternal masih tinggi, dan literasi keuangan tetap menjadi hambatan utama dalam mendorong inklusi. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah industri tidak hanya terletak pada inovasi produk, tetapi juga pada pemerataan akses, penguatan keamanan, dan peningkatan pemahaman masyarakat.

2 Tanggung Jawab Industri di Dekade Berikutnya



Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir, menekankan bahwa satu dekade AFTECH bukan sekadar catatan perjalanan organisasi, tetapi bentuk tanggung jawab bersama industri. Menurutnya, fintech perlu dimanfaatkan secara benar, aman, dan memberi manfaat nyata, terutama bagi UMKM, petani, nelayan, dan pelaku sektor riil. Pandangan ini menempatkan fintech bukan hanya sebagai bagian dari ekonomi digital, tetapi juga sebagai alat yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

Pandu juga menegaskan bahwa jika fintech ingin berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional, maka dekade berikutnya harus diisi dengan inovasi yang lebih efektif, lebih efisien, dan lebih dekat dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan kata lain, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar menghadirkan layanan baru, tetapi memastikan bahwa layanan tersebut benar-benar memberi nilai tambah dan memperkuat kepercayaan publik terhadap industri.

3 Chatpindar dan Bentuk Baru Literasi Keuangan

Dalam momentum yang sama, AFTECH bersama Easycash meluncurkan Chatpindar.com, sebuah inisiatif literasi keuangan digital berbasis web yang menggunakan teknologi AI dalam format percakapan. Platform ini dirancang agar masyarakat bisa bertanya langsung mengenai pinjaman daring dengan bahasa sehari-hari dan mendapatkan jawaban yang mudah dipahami, relevan, dan kontekstual. Topik yang dapat ditanyakan mencakup perbedaan antara platform pindar berizin dan pinjol ilegal, dampak keterlambatan pembayaran, limit pinjaman, tenor, verifikasi data, keamanan data pribadi, hingga detail penagihan.



Peluncuran Chatpindar menunjukkan bahwa AFTECH ingin mendorong literasi keuangan ke bentuk yang lebih praktis dan lebih dekat dengan keseharian masyarakat. Pendekatan ini penting karena kebutuhan informasi sering muncul di luar seminar, webinar, atau konten edukasi formal. Dengan format percakapan yang selalu tersedia, Chatpindar diharapkan bisa membantu masyarakat mengambil keputusan finansial yang lebih bijak dan aman.

Meski demikian, platform ini diposisikan sebagai fasilitas edukasi keuangan, bukan sumber referensi hukum maupun layanan pelanggan dari platform pinjaman daring. Penegasan ini penting agar fungsi Chatpindar tetap jelas, yaitu sebagai sarana edukasi publik yang membantu masyarakat memahami produk dan risiko secara lebih sederhana.

4 Menata Arah Setelah Satu Dekade



Bagi AFTECH, satu dekade pertama adalah fondasi. Tantangan pada dekade berikutnya adalah menjaga agar industri fintech tumbuh sehat, dipercaya, dan memberi dampak ekonomi yang lebih luas. Karena itu, peringatan HUT ke-10 ini tidak berhenti pada perayaan, tetapi juga memperlihatkan arah yang ingin dibangun: industri yang lebih matang, literasi yang lebih kuat, keamanan yang lebih terjaga, dan kolaborasi yang lebih erat antara inovasi dan kepercayaan.



Artikel Member

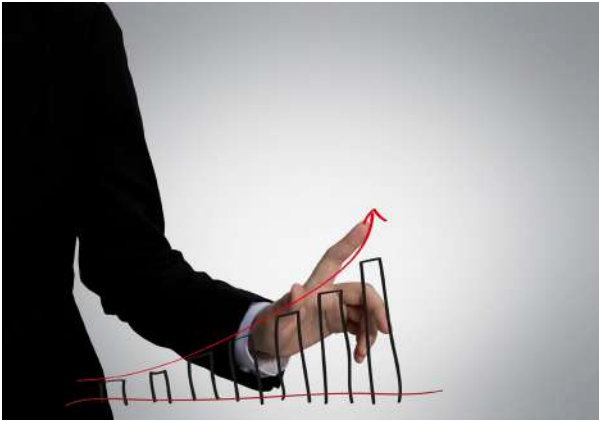
**BPS**

Bangun Percaya Sosial

Sharper Risk Separation, Smarter Approval Growth: **Refleksi atas Evolusi Skor Kredit di Era Digital**

Perkembangan industri fintek yang semakin dinamis mendorong kebutuhan akan pendekatan penilaian kredit yang lebih adaptif dan berbasis data. Di tengah upaya memperluas inklusi keuangan, pelaku industri juga dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kualitas portofolio agar tetap sehat. Oleh karena itu, inovasi dalam credit scoring menjadi semakin relevan, khususnya dalam menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan dan pengelolaan risiko.

Salah satu arah perkembangan yang mulai terlihat adalah pemanfaatan model Skor Kredit yang lebih kontekstual, disesuaikan dengan karakteristik produk pembiayaan. Dengan semangat “*sharper risk separation, smarter approval growth*,” pendekatan ini menekankan pentingnya pemisahan risiko yang lebih tajam serta proses persetujuan kredit yang lebih terukur. Pendekatan serupa juga diadopsi oleh pelaku industri seperti PT Bangun Percaya Sosial (BPS) dalam pengembangan model penilaian kredit yang lebih presisi.



Salah satu arah perkembangan yang mulai terlihat adalah pemanfaatan model Skor Kredit yang lebih kontekstual, disesuaikan dengan karakteristik produk pembiayaan. Dengan semangat “sharper risk separation, smarter approval growth,” pendekatan ini menekankan pentingnya pemisahan risiko yang lebih tajam serta proses persetujuan kredit yang lebih terukur. Pendekatan serupa juga diadopsi oleh pelaku industri seperti PT Bangun Percaya Sosial (BPS) dalam pengembangan model penilaian kredit yang lebih presisi.

Dalam praktiknya, model penilaian kredit untuk pinjaman tunai dan digital lending kini mulai berkembang melampaui indikator tradisional. Selain melihat riwayat keterlambatan pembayaran, model juga mempertimbangkan perilaku pengajuan pinjaman serta pola aktivitas digital, termasuk data telekomunikasi. Pendekatan ini membantu memberikan gambaran risiko yang lebih menyeluruh, bahkan sebelum potensi masalah muncul ke permukaan. Hasilnya adalah visibilitas risiko yang lebih dini serta peningkatan kualitas segmentasi nasabah.

Di sisi lain, untuk skema pembiayaan berbasis transaksi seperti pay-over-time atau buy now pay later (BNPL), pendekatan yang digunakan juga semakin spesifik. Model Skor Kredit dalam konteks ini banyak memanfaatkan variabel berbasis perilaku, seperti pola konsumsi, frekuensi transaksi, hingga konsistensi pembayaran cicilan. Dengan dukungan data yang lebih kaya, lembaga keuangan dapat mengidentifikasi risiko secara lebih presisi, sekaligus membuka peluang untuk menjangkau segmen yang sebelumnya belum terlayani secara optimal. Inisiatif pengembangan model seperti Cash Credit Score dan Commerce Credit Score menjadi contoh bagaimana pendekatan berbasis use case dapat meningkatkan relevansi analisis risiko.



Secara umum, penyempurnaan model-model ini menunjukkan adanya pergeseran menuju penggunaan data alternatif dan analitik yang lebih mendalam. Dampak yang diharapkan tidak hanya terbatas pada penurunan risiko kredit bermasalah, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengambilan keputusan secara keseluruhan. Segmentasi yang lebih jelas memungkinkan strategi penyaluran kredit yang lebih tepat sasaran, sementara visibilitas risiko yang lebih awal membantu memperkuat langkah mitigasi.

Pada akhirnya, arah perkembangan ini mencerminkan upaya industri dalam membangun pertumbuhan pembiayaan yang lebih berkelanjutan. Dengan segmentasi yang semakin jelas dan pemahaman risiko yang lebih baik, lembaga keuangan dapat mendorong pertumbuhan persetujuan kredit secara sehat tanpa mengorbankan kualitas maupun margin bisnis.

**Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan BPS, dapat menghubungi
Jerry Narendra, 0816-1822-456.**

Artikel Member



paywatch

Literasi Finansial di Tempat Kerja: Mengapa Akses Gaji Lebih Awal Mulai Diminati Karyawan Indonesia

Kalau dipikir lagi, sistem penggajian bulanan sebenarnya tidak dirancang untuk semua orang. Bagi karyawan dengan penghasilan menengah ke bawah, menunggu tanggal gaji sementara tagihan datang lebih awal adalah tekanan nyata yang mempengaruhi fokus dan produktivitas kerja sehari-hari.

Fenomena ini bukan sekadar keluhan, ada angkanya.

Sebanyak 91% pekerja Indonesia merasa kenaikan gaji tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup, dan lebih dari separuh mengaku kesulitan menyimpan uang di akhir bulan (INDEF, 2023). Ini bukan soal gaya hidup boros, ini soal kesenjangan struktural antarpendapatan dan kebutuhan riil.

CYBERSECURITY IN FINTECH 2026

Trends, Threats & Strategies for the Digital Finance Era

340%

Lonjakan Serangan AI
vs. 2024 (CrowdStrike)

\$6.2T

Kerugian Cybercrime Global
Proyeksi 2026 (Cybersecurity Ventures)

78%

Fintech Kena Insiden Siber
dalam 12 bulan terakhir

SPECIAL EDITION Q1 2026 | DF18 x AFTECH

Artikel Member



Pendahuluan

Cybersecurity sebagai Pilar Industri Fintech




Industri fintech Indonesia telah mengalami pertumbuhan eksponensial dalam satu dekade terakhir. Dengan lebih dari **360 perusahaan fintech** terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan volume transaksi digital yang melampaui **Rp 8.600 triliun** pada 2025, Indonesia kini menjadi salah satu ekosistem fintech terbesar di Asia Tenggara.

Namun di balik pertumbuhan ini, terdapat risiko yang semakin besar. Setiap transaksi digital, setiap data nasabah, dan setiap API yang terhubung menjadi potensi vektor serangan bagi pelaku kejahatan siber. Pada 2026, lanskap ancaman semakin canggih — didukung oleh kecerdasan buatan, jaringan kriminal terorganisasi secara global, dan kerentanan yang muncul dari transformasi digital yang bergerak lebih cepat dari kapasitas pengamanannya.

"Di industri keuangan, satu insiden keamanan bukan hanya soal kerugian finansial — ia adalah kehilangan kepercayaan yang bisa membutuhkan bertahun-tahun untuk dipulihkan."

Risiko Tinggi dalam Ekosistem Keuangan Digital

Fintech beroperasi di lingkungan yang unik: volume transaksi tinggi, data sensitif berlimpah, dan ekspektasi ketersediaan layanan 24/7. Tiga dimensi risiko utama yang dihadapi:

 Risiko Finansial	<ul style="list-style-type: none">✓ Fraud dan pencurian dana langsung merugikan nasabah dan platform✓ Biaya pemulihan insiden rata-rata USD 4,45 juta per kejadian (IBM, 2025)✓ Denda regulasi akibat pelanggaran UU PDP bisa mencapai 2% dari total pendapatan tahunan
 Risiko Reputasi & Kepercayaan	<ul style="list-style-type: none">✓ 73% pengguna meninggalkan platform fintech setelah satu insiden kebocoran data✓ Kepercayaan digital adalah aset paling berharga — sekali hilang, sulit dikembalikan✓ Media sosial mempercepat penyebaran informasi negatif pasca insiden
 Risiko Kepatuhan & Regulasi	<ul style="list-style-type: none">✓ POJK No. 11/POJK.03/2022 mewajibkan standar keamanan IT yang ketat✓ UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) 2023 berlaku penuh dengan sanksi berat✓ PCI-DSS 4.0 menjadi standar wajib untuk pemrosesan data kartu pembayaran

Gambaran Lanskap Ancaman 2026

Berdasarkan riset global dan pemantauan threat intelligence tim DF18, berikut adalah karakteristik lanskap ancaman siber yang dihadapi industri fintech di tahun 2026:

2.200+ Serangan per Menit secara global (Fortinet, 2025)	#1 Target Industri Keuangan selama 5 tahun berturut-turut	94% Serangan via Email vektor awal phishing & BEC
---	--	--

Tren Cybersecurity 2026 di Fintech

Tahun 2026 menandai titik infleksi dalam evolusi cybersecurity di sektor fintech. Lima tren berikut akan mendefinisikan bagaimana organisasi keuangan digital membangun, mempertahankan, dan mengembangkan postur keamanan mereka:

01

AI dalam Serangan & Pertahanan Siber

Kecerdasan buatan (AI) kini berada di kedua sisi medan pertempuran siber. Di sisi penyerang, Large Language Models (LLM) memungkinkan pembuatan phishing yang sangat personal, deepfake audio/video untuk social engineering, serta otomasi eksploitasi kerentanan dalam skala besar.

- › AI-generated spear phishing: tingkat keberhasilan meningkat 60% dibanding phishing konvensional
- › Adversarial AI: model machine learning digunakan untuk menghindari deteksi sistem SIEM
- › Di sisi defender: AI mempercepat threat detection dari hari menjadi milidetik
- › Automated Security Orchestration (SOAR) mengurangi waktu respons insiden hingga 85%

02

Zero Trust Architecture (ZTA) sebagai Standar Baru

Paradigma keamanan tradisional berbasis perimeter ('trust but verify') sudah tidak relevan dalam era cloud dan hybrid work. Zero Trust menerapkan prinsip 'never trust, always verify' — setiap akses diverifikasi secara kontinu, tanpa pengecualian.

- › Identity verification berkelanjutan: MFA adaptif berbasis konteks pengguna dan perangkat
- › Microsegmentation: membatasi lateral movement jika satu segmen jaringan terkompromis
- › Least privilege access: setiap entitas hanya mendapat akses minimum yang diperlukan
- › Continuous monitoring: setiap sesi aktif dipantau secara real-time

03

Cloud Security & Keamanan Kontainer

Adopsi multi-cloud dan arsitektur microservices membuka attack surface yang jauh lebih luas. Misconfiguration cloud menjadi penyebab 65% insiden data breach di sektor fintech — bukan kecanggihan serangan, melainkan kesalahan konfigurasi sederhana.

- › Cloud Security Posture Management (CSPM) untuk deteksi misconfiguration otomatis
- › Container security & Kubernetes hardening menjadi prioritas tim DevSecOps
- › Secrets management: mencegah API key dan credential tertanam dalam kode sumber
- › Data Loss Prevention (DLP) untuk cloud storage dan SaaS tools

04

API Security & Open Banking Challenges

Regulasi Open Banking BI-API mendorong interoperabilitas antar platform keuangan, namun setiap endpoint API adalah potensi celah keamanan. OWASP API Security Top 10 menjadi referensi wajib bagi tim pengembang fintech.

- › Broken Object Level Authorization (BOLA) menjadi serangan API #1 di 2026
- › Rate limiting & API gateway sebagai lini pertahanan pertama
- › API discovery & inventory: kenali semua API yang berjalan di ekosistem Anda
- › Mutual TLS (mTLS) untuk autentikasi dua arah pada API kritis

05

Regulasi & Compliance

Otoritas regulasi di Indonesia dan global memperketat standar keamanan siber untuk sektor keuangan. Kepatuhan bukan sekadar kewajiban hukum — ini adalah sinyal kepercayaan kepada nasabah dan mitra bisnis.

- › UU PDP 2023: kewajiban pelaporan insiden dalam 14 hari, sanksi hingga Rp 35 miliar
- › POJK 11/2022: penetration testing wajib minimal 1x per tahun
- › PCI-DSS v4.0: 64 requirements baru yang efektif mulai Maret 2025
- › ISO/IEC 27001:2022 menjadi standar sertifikasi utama yang diminati mitra B2B

Ancaman Utama di Industri Fintech

Memahami musuh adalah langkah pertama dalam pertahanan efektif. Berikut adalah lima vektor ancaman paling signifikan yang menargetkan ekosistem fintech di 2026, dilengkapi dengan ilustrasi kasus nyata:

01

AI-Powered Phishing & Business Email Compromise (BEC)

Generasi baru phishing tidak lagi mengandalkan template generik yang mudah dikenali. LLM dan deepfake memungkinkan penyerang membuat email, SMS, dan pesan WhatsApp yang secara sempurna meniru gaya komunikasi eksekutif perusahaan — lengkap dengan konteks bisnis yang relevan. BEC 2.0 ini menargetkan proses transfer dana, perubahan rekening vendor, dan akses kredensial karyawan kunci.

Ilustrasi Kasus: Sebuah platform pinjaman online di Jakarta kehilangan Rp 4,2 miliar setelah staf keuangannya menerima email 'dari CEO' yang dibuat AI, meminta transfer urgent ke rekening vendor baru — Q3 2025.

02

Data Breach & Account Takeover (ATO)

Dengan miliaran pasang kredensial yang beredar di dark web hasil kebocoran data bertahun-tahun, serangan credential stuffing dapat dilakukan dalam skala masif menggunakan bot otomatis. Fintech yang tidak mengimplementasikan MFA adaptif, anomaly detection, dan bot protection menjadi target empuk. ATO pada platform pembayaran membuka akses ke rekening, kartu tersimpan, dan data identitas nasabah.

Ilustrasi Kasus: Pada kuartal pertama 2025, satu kelompok kriminal berhasil mengkompromis lebih dari 85.000 akun di sebuah e-wallet Asia Tenggara menggunakan 200 juta kombinasi kredensial yang dibeli di darknet.

03

Supply Chain Attack pada Ekosistem Fintech

Fintech modern sangat bergantung pada ekosistem vendor pihak ketiga: payment processor, KYC provider, analytics platform, dan ratusan library open-source. Satu komponen yang terkompromis dalam rantai pasok dapat memberikan akses ke seluruh sistem klien vendor tersebut — tanpa perlu menyerang target secara langsung. Serangan supply chain sulit dideteksi karena berasal dari sumber yang dianggap terpercaya.

Ilustrasi Kasus: Insiden XZ Utils backdoor (2024) menunjukkan bagaimana kontributor berbahaya menyusupkan backdoor dalam library yang digunakan jutaan server — termasuk infrastruktur keuangan global.

04

Digital Payment Fraud & Synthetic Identity

Identitas sintesis — kombinasi data asli dan palsu yang tidak ada dalam database fraud tradisional — menjadi instrumen utama penipuan di platform pinjaman digital dan pembayaran. Di Indonesia, QRIS spoofing (penggunaan kode QR palsu yang mengarahkan pembayaran ke rekening penipu) dan manipulasi transfer real-time menjadi modus yang meningkat signifikan.

Ilustrasi Kasus: Otoritas keuangan Indonesia mencatat lonjakan 180% laporan fraud QRIS pada 2025. Kerugian kumulatif mencapai Rp 890 miliar dalam satu tahun — mayoritas menimpa UMKM dan masyarakat non-perkotaan.

05

Ransomware terhadap Infrastruktur Kritis Fintech



Kelompok Ransomware-as-a-Service (RaaS) semakin menargetkan core banking system, payment gateway, dan data center fintech — menyadari bahwa layanan keuangan memiliki toleransi downtime hampir nol. Taktik double extortion (enkripsi data + ancaman publikasi) meningkatkan tekanan korban untuk membayar tebusan.

Ilustrasi Kasus: Sebuah perusahaan payment gateway Asia Tenggara mengalami downtime 31 jam akibat serangan ransomware LockBit pada 2025, menyebabkan kerugian operasional USD 12 juta dan investigasi regulasi OJK.

Strategi & Solusi Keamanan

Menghadapi lanskap ancaman 2026, perusahaan fintech tidak cukup hanya bereaksi saat insiden terjadi. Dibutuhkan pendekatan keamanan yang proaktif, berlapis, dan berkelanjutan. Berikut adalah framework strategis yang direkomendasikan tim DF18 :

A. Implementasi Best Practices Cybersecurity

 Fondasi Keamanan	<ul style="list-style-type: none">✓ Terapkan Zero Trust: autentikasi MFA adaptif untuk SEMUA akses sistem kritis✓ Network segmentation & microsegmentation untuk membatasi blast radius insiden✓ Enkripsi end-to-end: AES-256 at-rest, TLS 1.3 in-transit, tanpa pengecualian✓ Manajemen patch sistematis: SLA perbaikan CVE kritis maksimal 24 jam✓ Hardening konfigurasi server, cloud, dan perangkat endpoint secara berkala
 Visibility & Monitoring	<ul style="list-style-type: none">✓ Implementasi SIEM (Security Information & Event Management) terintegrasi✓ EDR (Endpoint Detection & Response) di seluruh perangkat korporat✓ Threat Intelligence Platform untuk early warning ancaman yang relevan✓ Log management terpusat dengan retensi minimal 12 bulan (sesuai POJK)✓ Network Traffic Analysis (NTA) untuk deteksi anomali lalu lintas data

B. Security Awareness & Culture Building

Teknologi terbaik tidak berarti apa-apa jika manusia — karyawan, mitra, dan pengguna — menjadi titik lemah. Security awareness bukan program sekali jalan, melainkan budaya berkelanjutan:

Untuk Tim Internal

- Phishing simulation berkala (minimal 4x/tahun)
- Security champion program di setiap departemen
- DevSecOps training untuk tim developer
- Incident reporting culture yang aman & tidak menghukum
- Tabletop exercise simulasi insiden ransomware/breach

Untuk Pengguna Akhir

- In-app security tips dan notifikasi aktivitas mencurigakan
- Edukasi pengenalan phishing via SMS/WhatsApp/email
- Panduan keamanan kata sandi dan penggunaan autentikator
- Kanal pelaporan mudah untuk aktivitas mencurigakan
- Security awareness konten dalam bahasa daerah

C. Teknologi Monitoring & Threat Detection

"Rata-rata waktu deteksi insiden siber di industri keuangan adalah 212 hari — selama itu penyerang bebas bergerak di dalam sistem Anda. Monitoring real-time memangkas waktu ini menjadi menit."

Stack teknologi monitoring yang direkomendasikan untuk fintech 2026:

 Security Technology Stack	<ul style="list-style-type: none">✓ SIEM + SOAR: deteksi, korelasi, dan respons otomatis terhadap ancaman✓ XDR (Extended Detection & Response): visibilitas menyeluruh lintas endpoint, jaringan, cloud✓ Threat Intelligence Feed: informasi ancaman real-time dari sumber global terpercaya✓ CASB (Cloud Access Security Broker): kontrol akses dan visibilitas penggunaan cloud✓ WAF + API Gateway: perlindungan aplikasi web dan endpoint API dari serangan OWASP✓ DDoS Protection & Bot Management untuk ketersediaan layanan yang kontinu
---	---

D. Continuous Security Testing

Keamanan yang tidak diuji adalah keamanan yang tidak terverifikasi. Program continuous security testing memastikan pertahanan Anda selalu relevan terhadap ancaman terbaru:



Testing Lifecycle

- ✓ Vulnerability Assessment: scan sistematis minimal bulanan menggunakan tool otomatis
- ✓ Penetration Testing: simulasi serangan terstruktur minimal 2x per tahun (wajib POJK)
- ✓ Red Team Exercise: simulasi advanced persistent threat (APT) skala penuh
- ✓ Bug Bounty Program: manfaatkan komunitas researcher untuk temukan celah tersembunyi
- ✓ Security Code Review: integrasikan SAST/DAST dalam pipeline CI/CD (DevSecOps)



RAPAT UMUM
ANGGOTA
TAHUNAN 2026



fintech
indonesia

RAPAT UMUM ANGGOTA

TAHUNAN AFTECH 2026

Selasa,
12 Mei 2026



Jakarta
Area



For further
information

Anna Mariyama
(In-house Legal Counsel AFTECH)
anna.mariyama@fintech.id
+6281278992576



www.fintech.id



fintechid



fintechid



fintechid



fintech.id



Asosiasi Fintech Indonesia

Coming Soon



INDONESIA
DIGITAL BANK
SUMMIT 2026

On July, 2026

Regulatory News:

HukumOnline

LPBBTI Diperluas: Peran Surat Berharga Pemerintah Ditambahkan, Perjanjian Pendanaan yang Ada Harus Disesuaikan Paling Lambat 31 Januari 2026

SUMBER: HUKUMONLINE.COM

Pada akhir tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) menerbitkan Peraturan No. 40 Tahun 2024 (“**POJK 40/2024**”) tentang Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi Informasi (“**LPBBTI**”). Sebagaimana judulnya, peraturan tersebut mengatur berbagai ketentuan yang secara khusus membahas penyelenggaraan layanan LPBBTI. Di antara bidang-bidang lain, POJK 40/2024 secara umum mengatur berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara LPBBTI (“**Penyelenggara**”) terkait kegiatan usaha dan distribusi dana.¹

Sekarang, dalam upaya untuk memperjelas ketentuan-ketentuan dalam POJK 40/2024, OJK menerbitkan Surat Edaran No. 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan LPBBTI (“**SEOJK19/2025**”), yang secara resmi berlaku pada 31 Juli 2025.² Pemberlakuan SEOJK 19/2025 ini secara bersamaan mencabut dan membuat No. 19/SEOJK.06/2023 (“**SEOJK 19/2023**”) tidak berlaku, yang memiliki judul dan membahas hal yang sama dengan SEOJK 19/2025.³

Meskipun mempertahankan sebagian besar ketentuan yang semula diatur dalam SEOJK 19/2023, Surat Edaran baru ini memperluas cakupan keseluruhan kegiatan usaha LPBBTI dan memperkenalkan beberapa ketentuan baru yang secara khusus mengatur mekanisme Rapat Umum Pemberi Dana (“**RUPD**”) serta persyaratan pendanaan.⁴ Selain itu, perlu dicatat bahwa perjanjian pendanaan yang ditandatangani sebelum berlakunya SEOJK 19/2025 akan tetap berlaku hingga tanggal berakhirnya.⁵ Sementara itu, perjanjian antara penerima (“**Penerima Dana**”) dan pemberi pendanaan (“**Pemberi Dana**”) yang sudah berlaku sebelum penerbitan SEOJK 19/2025 harus disesuaikan dengan ketentuan baru paling lambat 31 Januari 2026.⁶

(Bersambung ke halaman berikutnya)

[1] Lebih lanjut mengenai POJK 40/2024, lihat ILB No. 5050.
[2] Recital dan Bag. XXII.2, SEOJK 19/2025.
[3] Bag. XXII.1, SEOJK 19/2025.

[4] Bag. V.1, SEOJK 19/2025.
[5] Bag. XXI.4, SEOJK 19/2025.
[6] Bag. XXI.6, SEOJK 19/2025.

Berdasarkan latar belakang di atas, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) kali ini menyajikan ringkasan ketentuan baru yang diatur dalam SEOJK 19/2025 dan membandingkannya dengan SEOJK 19/2023 yang telah dicabut dan diganti, khususnya terkait dengan hal-hal berikut:

1. Revisi Kegiatan Usaha LPBBTI;
2. Mekanisme RUPD; dan
3. Kriteria Kelayakan Pemberi dan Penerima Dana Dana serta Batas Maksimum Pendanaan.

Revisi Kegiatan Usaha LPBBTI

Selain berbagai layanan utama LPBBTI yang boleh ditawarkan Penyelenggara (yaitu penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian LPBBTI) berdasarkan SEOJK 19/2023, kerangka SEOJK 19/2025 kini juga mengizinkan Penyelenggara untuk melakukan kegiatan lain sebagai berikut:⁷

1. Bertindak sebagai mitra distribusi atas surat berharga pemerintah untuk mendukung
2. program pemerintah;
3. Kerja sama layanan informatif; dan/atau
4. Kegiatan lain, sebagaimana diizinkan berdasarkan persetujuan OJK.

Selain itu, SEOJK 19/2025 menjelaskan bahwa kegiatan lain yang disebutkan pada poin (3) di atas dapat mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penugasan pemerintah, pengembangan layanan pendanaan yang meningkatkan risiko Penyelenggara, dan/atau kerja sama dengan pihak lain untuk perolehan bisnis.⁸ Dalam hal ini, kerja sama untuk tujuan perolehan bisnis hanya dapat dilakukan jika kegiatan tersebut dituangkan dalam perjanjian kerja sama tertulis, tidak bertujuan untuk melakukan penguasaan pasar, dan tidak melibatkan konflik dengan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara.⁹

Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, SEOJK 19/2025 mewajibkan Penyelenggara untuk menggunakan jenis-jenis akad berikut:¹⁰



(Bersambung ke halaman berikutnya)

[7] Bandingkan Bag. II.1, SEOJK 19/2023 dengan Bag. II.1 - 2, SEOJK 19/2025.

[8] Bag. II.6, SEOJK 19/2025.

[9] Bag. II.8, SEOJK 19/2025

[10] Bag. III.2, SEOJK 19/2025.

Selain itu, SEOJK 19/2025 juga telah merevisi berbagai aspek pendukung yang berkaitan dengan penggunaan jenis akad yang tercantum di atas, yang memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah. Aspek-aspek pendukung ini dirangkum dalam tabel di bawah ini:¹¹

Aspek	SEOJK 19/2023	SEOJK 19/2025
Fatwa dan/atau pernyataan kepatuhan syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (“MUI”)	√	√
Opini dari Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) penyelenggara mengenai penggunaan akad tertentu untuk kegiatan usaha yang didasarkan pada prinsip syariah, setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan atau konfirmasi dari MUI	√	
Opini dari DPS mengenai penggunaan kontrak tertentu untuk kegiatan usaha dalam hal fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah belum dikeluarkan		√

Mekanisme RUPD

RUPD dapat diselenggarakan jika dianggap perlu oleh Penyelenggara, Pemberi Dana, dan/atau Penerima Dana. Jika Penyelenggara berencana untuk menyelenggarakan RUPD, maka Penyelenggara wajib menyusun pedoman pelaksanaan, yang setidaknya harus mencakup ketentuan-ketentuan berikut:¹²

1. Prosedur pelaksanaan, termasuk hak Pemberi Dana untuk menghadiri RUPD dan menggunakan hak suaranya, hak Penerima Dana untuk menghadiri RUPD (jika diperlukan), mekanisme rapat (daring atau luring), serta pemberitahuan dan pemanggilan rapat.
2. Mekanisme pelaksanaan, yang harus memastikan bahwa RUPD dipimpin oleh seorang pemimpin rapat, mengikuti proses pelaksanaan yang telah ditetapkan, dan melibatkan proses pengambilan keputusan yang adil; dan
3. Pedoman pelaksanaan, yang harus menjelaskan prosedur pengajuan usulan RUPD, dokumentasi pelaksanaan dan keputusan, biaya pelaksanaan yang harus ditanggung oleh Penyelenggara, serta pemilihan dan penetapan pimpinan RUPD.

(Bersambung ke halaman berikutnya)

[11] Bandingkan Bag. III.2, SEOJK 19/2023 dengan Bag. III.2, SEOJK 19/2025.

[12] Bag. V.2 - 3, SEOJK 19/2025.

Biaya-biaya yang terkait dengan pelaksanaan RUPD harus ditanggung oleh Penyelenggara. Oleh karena itu, semua RUPD harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kapasitas Penyelenggara yang bersangkutan, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan di atas.¹³

Kriteria Kelayakan Pemberi dan Penerima Dana Dana serta Batas Maksimum Pendanaan

Dibandingkan dengan kerangka SEOJK 19/2023 sebelumnya, SEOJK 19/2025 kini menjelaskan kriteria kelayakan yang lebih rinci untuk Pemberi Dana dan Penerima Dana, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:¹⁴

Kriteria Pemberi Dana	Kriteria Penerima Dana
1. Pemberi Dana Profesional dapat meliputi: 1) Warga Negara Indonesia (berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah, dengan penghasilan bruto tahunan melebihi Rp. 500 juta, dan total pendanaan yang tidak melebihi 20% dari penghasilan tahunan mereka di satu Penyelenggara; 2) Warga Negara Asing; 3) Badan hukum Indonesia/asing; 4) Badan usaha Indonesia/asing; dan/atau 5) Lembaga Internasional.	1. Warga negara Indonesia yang berusia di atas 18 tahun atau telah menikah, dengan penghasilan bruto bulanan rata-rata sebesar Rp. 3 juta yang menggunakan perangkat mereka sendiri selama proses pendanaan;
2. Pemberi Dana nonprofesional, yang dapat meliputi warga negara Indonesia berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah, dengan penghasilan bruto	2. Badan hukum Indonesia; dan/atau
tahunan yang lebih kecil atau sama dengan Rp. 500 juta, dan total pendanaan yang tidak melebihi 10% dari penghasilan tahunan di satu Penyelenggara. Perlu dicatat bahwa rasio pendanaan yang belum dilunasi untuk Pemberi Dana non profesional terhadap total pendanaan yang belum dilunasi untuk semua Pemberi Dana telah ditetapkan maksimal 20%.	3. Badan usaha Indonesia.

(Bersambung ke halaman berikutnya)

[13] Bag. V.4 - 5, SEOJK 19/2025.
 [14] Bag. IX.2 - 6, SEOJK 19/2025.

Perlu dicatat bahwa distribusi dana oleh Pemberi Dana, serta pembayaran kembali oleh Penerima Dana, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, untuk memastikan bahwa Pemberi Dana dan Penerima Dana memahami risiko pembiayaan, mereka juga harus mengisi pernyataan pemahaman menggunakan format yang disediakan dalam Lampiran SEOJK 19/2025. Selain itu, semua Pemberi Dana dan Penerima Dana harus memenuhi persyaratan usia dan penghasilan minimum yang telah disebutkan di atas, serta menyerahkan pernyataan pemahaman yang dimaksud paling lambat 1 Januari 2025.¹⁵

Selain itu, SEOJK 19/2025 menegaskan bahwa batas maksimum pembiayaan konsumtif dan produktif yang dapat diberikan kepada Penerima Dana telah ditetapkan sebesar Rp 2 miliar.¹⁶ Namun, Penyelenggara dapat memberikan pendanaan melebihi batas hingga Rp 5 miliar jika Penyelenggara dapat memiliki kualitas pendanaan macet maksimal 5% selama enam bulan terakhir dan tidak dikenakan sanksi OJK yang sedang berlangsung (terutama pembatasan atau pembekuan).¹⁷

Selain itu, Penyelenggara juga harus memastikan bahwa total pendanaan yang diberikan kepada semua Penerima Dana sesuai dengan batas maksimum pendanaan jika Penyelenggara memberikan pendanaan kepada beberapa Penerima Dana melalui sumber pendapatan atau arus kas yang sama untuk pembayaran kembali, atau memiliki hubungan afiliasi.¹⁸

SEOJK 19/2025 lebih lanjut menjelaskan bahwa hubungan afiliasi tersebut dapat mencakup hal-hal berikut, di antaranya:¹⁹

1. Hubungan keluarga melalui perkawinan atau darah hingga derajat kedua, jika Penerima Dana adalah badan usaha atau badan hukum;
2. Dipekerjakan secara langsung oleh Penerima Dana, jika Penerima Dana adalah individu;
3. Tindakan yang dilakukan atas nama Penerima Dana lain, di mana Penerima Dana bukan badan usaha, badan hukum, atau individu; dan seterusnya.

Poin Penting

SEOJK 19/2025 kini telah memperkenalkan sejumlah kegiatan usaha tambahan yang diizinkan, serta menjelaskan mekanisme RUPD sembari memperketat persyaratan kelayakan dan batas pendanaan bagi Pemberi Dana dan Penerima Dana. Perubahan penting meliputi kriteria yang lebih jelas pendapatan dan status, pernyataan wajib mengenai pemahaman risiko, serta batas pendanaan yang lebih tinggi bagi penyelenggara yang patuh dengan kinerja kredit yang kuat. Sementara itu, perlu dicatat bahwa semua perjanjian yang ada tetap berlaku, namun harus disesuaikan dengan ketentuan baru paling lambat 31 Januari 2026.

Tentang Hukumonline

Hukumonline didirikan 25 tahun lalu oleh beberapa praktisi hukum dan pengacara Indonesia yang bertujuan untuk menjadi solusi satu atap bagi praktisi hukum Indonesia. Kini, Hukumonline telah menjadi sebuah platform regulasi berbasis teknologi (reg-tech) yang mendemokratisasi akses hukum dan memberdayakan para praktisi hukum dengan berbagai layanan berbasis AI seperti Regulatory Compliance System Cloud serta Allex. Kunjungi Hukumonline.com untuk mengetahui solusi lainnya.

[15] Bag. XXI.1, SEOJK 19/2025.

[16] Bag. X.1, SEOJK 19/2025.

[17] Bag. X.2, SEOJK 19/2025.

[18] Bag. X.3, SEOJK 19/2025.

[19] Bag. X.4, SEOJK 19/2025.



***Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)
mengusung komunitas Fintech & UMKM
yang berjalan maju ke depan secara
solid dan berkelanjutan***

Anggota AFTECH dan UMKM binaan menjadi bagian dari pergerakan ekonomi digital yang berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan edukasi literasi dan lokakarya yang diselenggarakan oleh AFTECH beserta regulator guna meningkatkan perkembangan ekosistem UMKM yang mampu beradaptasi dengan transformasi digital.

Bersama-sama **Fintech & UMKM Jalan Terus** dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih kuat, resiliens, dan maju dengan menciptakan ruang “*entrepreneurship*” yang adaptif dan berdikari.

Untuk informasi lebih lanjut dan partisipasi dalam **Program FULUS**, silahkan menghubungi AFTECH Sekretariat melalui email: marcomm@fintech.id





Asosiasi Fintech Indonesia

Eco-S Coworking & Office Space Sahid Sudirman Residence,
Jl. Jenderal Sudirman No.86 2nd floor,
Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220

 www.fintech.id

 [fintech.id](https://www.tiktok.com/fintech.id)

   [fintechid](https://www.facebook.com/fintechid)

 [Asosiasi Fintech Indonesia](https://www.youtube.com/AsosiasiFintechIndonesia)

